

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sinjai Periode 2013 - 2018 dan bersifat indikatif.

Pemerintah Kabupaten Sinjai terus mendorong peningkatan produksi dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan budidaya, sementara pada pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap diupayakan melalui pengembangan sarana dan prasarana teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Adapun Produksi Perikanan Kabupaten Sinjai bersumber dari usaha perikanan penangkapan laut dan usaha perikanan budidaya (Laut, Tambak , Kolam dan Sawah). Belum optimalnya pencapaian tingkat produktifitas usaha perikanan budidaya dan upaya penangkapan memberi dampak pada kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor perikanan secara keseluruhan. Pembangunan usaha kelautan dan perikanan Kabupaten Sinjai ke depan akan menjadi usaha perikanan yang memiliki daya saing yang tinggi. Upaya yang dilakukan diarahkan pada optimalisasi dan pengembangan kegiatan produksi, peningkatan daya saing melalui penanganan dan pengolahan produk hasil perikanan. Dengan komitmen ini, pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Sinjai secara optimal akan mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Sinjai.

Beberapa alasan yang dapat menjadi pertimbangan terhadap pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Sinjai, diantaranya:(1) Pembangunan Sektor Perikanan Budidaya kedepan menekankan pada peningkatan produksi melalui upaya rekayasa teknologi dan upaya perbaikan lingkungan/habitat

pemeliharaan; (2) Pembangunan sektor Perikanan Tangkap diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berbasis pada pengembangan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan (fishing technology); (3) Adanya Gerakan Peningkatan Produksi Komoditas terhadap komoditi unggulan seperti udang, bandeng, rumput laut, dan Tuna/Cakalang sebagai wujud dari Revitalisasi Perikanan dan Kelautan; (4) semakin bergairahnya masyarakat pembudidaya udang dan rumput laut untuk berusaha karena lingkungan sumberdaya perikanan yang mendukung; (5) adanya trend dukungan kebutuhan akan semakin besar sehingga ada jaminan pasar.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai sebagai lembaga pemerintah diberi mandat untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pembinaan, pelayanan kepada masyarakat dimana dituntut untuk menyusun Perencanaan Strategis yang Akuntabel. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat kepada aparat pemerintah untuk merespon atas mandat yang diberikan dalam rangka pencapaian misi pembangunan.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai Periode 2013 – 2018 merupakan perencanaan pembangunan dalam jangka lima tahun dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang diarahkan sebagai langkah adaptasi terhadap era globalisasi serta diposisikan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Sinjai yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
2. Undang – undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
4. Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
5. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
6. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil,
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah,

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota,
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia,
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 5 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai Tahun 2012 - 2032,
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 - 20125,
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD),

23. Peraturan Bupati Sinjai No. 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai adalah, (1) untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, (2) sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan dan menjadi acuan bagi instansi terkait dalam mendukung pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai, (3) sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran .

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai adalah menetapkan langkah yang akan diambil dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Sinjai yang telah ditetapkan dalam bentuk sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan sebagai tujuan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Sinjai dapat diwujudkan sesuai visi dan misinya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Renstra Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai yang diimplementasikan melalui dukungan dana yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Strategi yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai untuk tahun 2008 - 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I** Pendahuluan. memuat uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- Bab II** Gambaran Pelayanan SKPD memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumberdaya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya dan

capaian program yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2008 – 2013 serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

- Bab III** Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi isu-isu strategis yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.
- Bab IV** Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan memuat uraian tentang visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggambarkan apa yang diharapkan akan datang, dan misi yang menggambarkan langkah-langkah utama yang akan diambil untuk mendukung pencapaian visi, serta strategi dan kebijakan.
- Bab V** Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, memuat uraian tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan.
- Bab VI** Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, memuat indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi menyelenggarakan sebagian kewenangan Kabupaten dalam bidang eksplorasi laut dan perikanan.

Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- b. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas Pembantuan;
- c. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya.;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas;
- h. Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah;
- i. Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksanan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;

A. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
- 3) Bagian Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program
- c. Sub Bagian Keuangan
- 4) Bidang Perikanan Budidaya membawahi :
 - a. Seksi Budidaya Laut
 - b. Seksi Budidaya Air Payau
 - c. Seksi Budidaya Air Tawar dan Perairan Umum
- 5) Bidang Perikanan Tangkap dan KP3K membawahi :
 - a. Seksi Perikanan Tangkap
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat KP3K
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana KP3K
- 6) Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan
 - b. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi
 - c. Seksi Pembinaan dan Kelembagaan

Bagian Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Sub Bagian Keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka bagian Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan Pertanggung jawaban keuangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pelaksanaan penyiapan data dan informasi, kepustakaan dan hubungan masyarakat;
- f. Pengkoordinasian kegiatan yang dilaksanakan dinas;
- g. Pelaksanaan analisis dan pengendalian pelaksanaan program dan proyek;
- h. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan program dan proyek serta penetapan Rencana Strategis;
- i. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan yang meliputi Budidaya Laut, Budidaya Air Payau dan Budidaya Air Tawar dan Perairan Umum Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan sistem operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan tugas perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan adanya bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- j. Menyelenggarakan pembinaan Budidaya Laut, Budidaya Air Payau dan Budidaya Air Tawar dan Perairan Umum;
- k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;

- l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perikanan Tangkap dan KP3K, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi Perikanan Tangkap, Pemberdayaan Masyarakat KP3K, Sarana dan Prasarana KP3K. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bidang perikanan Tangkap dan KP3K melaksanakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas:
- c. Mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- d. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- e. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas:
- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengn ketentuan peratuarn perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan Perikanan Tangkap, Pemberdayaan Masyarakat KP3K, Sarana dan Prasarana KP3K;

- k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- l. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi pengawasan, konservasi dan rehabilitasi dan pembinaan dan kelembagaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan mempunyai fungsi sebagai :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinir para kepala seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;

- j. Melaksanakan Pengawasan, Konservasi dan Rehabilitasi dan Pertimbangandan kelembagaan bidang kelautan dan perikanan;
- k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- m. Mengkoordinir para kepala seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan yang meliputi Pengolahan dan Bina Mutu, Pemasaran dan Promosi, Bina Usaha dan Permodalan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan penataan dan pengelolaan perairan;
- c. Mengkoordinir para kepala seksi dalam merumuskan Program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- j. Melaksanakan Pembinaan, Pengolahan, Bina Mutu, pemasaran, Promosi Bina Usaha dan Permodalan;
- k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Adapun struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai seperti terlihat pada gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sinjai

2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan

2.2.1. Kepegawaian

a. Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013 tercatat sebanyak 38 orang, dengan tingkat pendidikan bervariasi dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai Magister Sains (S2) sebagai berikut :

Tabel.2.1.
Struktur Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	S2	2	-	2
2	S1	15	9	24
3	Sarjana Muda	3	-	3
4	SLTA	5	4	9
	Jumlah	26	13	38

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013

b. Tingkat Penjenjangan dan Eselon

Tingkat penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sinjai sejak tahun 2008 – 2012 sebanyak 19 orang yang mulai dari Diklat PIM IV sampai dengan Diklat PIM II sebagai berikut :

Tabel.2.2.
Struktur Diklat PIM 2008 -2012

No	Diklat	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Diklat PIM II	1	-	1
2	Diklat PIM III	3	2	5
3	Diklat PIM IV	6	7	13
	Jumlah	10	9	19

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013

Tabel.2.3.
Jumlah Jabatan Struktural

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	2	3	5
3	Eselon IV	8	4	12
	Jumlah	11	7	18

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013

a. Pangkat dan Golongan

Tingkat kepangkatan dan golongan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai bervariasi dari Golongan II sampai Golongan IV sebagai berikut :

Tabel.2.4.
Struktur Pegawai Menurut Tingkat Kepangkatan dan Golongan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Golongan IV/c	1	-	1
2	Golongan IV/b	2	-	2
3	Golongan IV/a	1	-	1
4	Golongan III/d	3	5	8
5	Golongan III/c	1	1	2
6	Golongan III/b	5	3	8
7	Golongan III/a	7	4	11
8	Golongan II/d	1	-	1
9	Golongan II/c	1	-	1
10	Golongan II/b	3	-	3
	Jumlah	26	13	38

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013

b. Distribusi Sumberdaya Pegawai

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai terdiri atas 4 bidang teknis dan Sekretariat. Pada unit tersebut telah terdistribusi pegawai dengan jumlah sumberdaya kepegawaian sebagai berikut :

Tabel. 2.5
Distribusi Sumberdaya Pegawai

No	Bidang/Unit	PNS		Jumlah	Tenaga Kontrak		Jumlah
		Jenis Kelamin			Jenis Kelamin		
		Pria	Wanita		Pria	Wanita	
1	Perikanan Budidaya	5	2	8	1	1	1
2	Perikanan Tangkap dan KP3K	7	-	7	1	1	2
3	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3	3	6	-	1	1
4	Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya KP	2	2	4	1	1	2
5	Sekretariat	5	4	9	1	3	4
6	BBI Palangka	-	1	1	5	3	8
7	BBI Tassililu	1	-	1	3	1	4
8	Pos Pengawas	2	1	3	5	1	6
	Jumlah	22	12	38	18	11	29

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang mendukung Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai untuk mengembangkan program dan kegiatan guna menunjang tugas dan fungsi pelayanan adalah :

A. Bidang Perikanan Tangkap dan KP3K

➤ Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Pelabuhan Perikanan adalah Prasarana Perikanan tangkap yang fungsinya :

1. Tempat kegiatan bongkar muat hasil perikanan
2. Sebagai sarana bengkel untuk perbaikan kapal, mesin dan alat tangkap ikan
3. Sebagai tempat sarana pembinaan nelayan dan sekaligus sebagai home base nelayan

Disamping sarana dan prasarana tersebut, juga dilengkapi sarana penunjang yakni (1) Tempat Pelelangan Ikan, (2) Tempat Kapal Bersandar, (3) Perkantoran

Di Kabupaten Sinjai sampai dengan tahun 2012, terdapat 2 unit Pelabuhan Perikanan (Tipe D) yang ada di Kelurahan Lappa dan Desa Tongke-Tongke dengan kondisi rata – rata baik.

➤ Navigasi Menara Pengawas (Lampu Suar)

Menara ini berfungsi memberikan petunjuk kepada nelayan yang berlayar di laut yang akan menuju ke PPI Lappa. Menara ini dibangun pada Tahun 2011 melalui dana DAK TA 2011.

➤ Wisma Nelayan dan Balai Pertemuan

Wisma Nelayan dan balai pertemuan berfungsi untuk memberikan penginapan kepada nelayan yang datang dari luar Kota Sinjai yang mendaratkan ikannya tapi tidak memiliki tempat menginap juga sebagai tempat pertemuan bagi nelayan. Wisma Nelayan dan Balai pertemuan ini dibangun pada Tahun 2012 melalui Dana TP Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen Perikanan Tangkap.

➤ Dermaga

Dermaga merupakan tempat tambat kapal-kapal yang akan berlabuh dan juga berfungsi sebagai pemecah ombak

➤ **Pondok Wisata**

Pembangunan pondok wisata bertujuan memberikan fasilitas peristirahatan bagi pengunjung yang melakukan aktivitas wisata disekitar hutan mangrove Desa Tongke-tongke Kec. Sinjai Timur. Dibangun pada Tahun 2011 melalui dana DAK.

➤ **Kantor KKLD**

Sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD), maka diperlukan pengawasan agar Kawasan Konservasi Laut yang telah ditetapkan tidak salah dalam pengelolaan dan pemanfaatannya, sehingga di perlukan Kantor Pengawasan KKLD.

Kawasan konservasi laut Daerah merupakan suatu kawasan yang dibentuk dengan tujuan untuk mencegah kerusakan terumbu karang. Kantor KKLD dibangun pada Tahun 2011 melalui dana DAK TA 2011.

➤ **Jalan, Tempat Parkir dan Gerbang**

Jalan, Tempat Parkir, dan Pintu Gerbang yang dibangun melalui dana Tugas Pembantuan (TP) pada Tahun 2012 memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang beraktivitas di PPI Lappa.

➤ **Pabrik Es curah**

Pabrik Es Curah berfungsi membuat balok es dalam bentuk kristal-kristal untuk lebih meningkatkan mutu hasil tangkap perikanan.

➤ **Pabrik Es Air Laut**

Pabrik Es air laut berfungsi membuat es balok dari bahan dasar laut untuk memudahkan dalam memperoleh bahan baku industri karena tersedia cukup melimpah dari alam

B. Bidang Perikanan Budidaya

➤ **Balai Benih Ikan (BBI)**

Sarana Pengembangan Budidaya Air Tawar (BBI) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai terdapat di Kecamatan Sinjai Barat (BBI Tassililu) dan di Kecamatan Sinjai Selatan (BBI Palangka).

Ada beberapa sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh BBI seperti :1) Kantor, 2) Ruang Pertemuan, 3) Mess, 4) Sarana Ibadah, 5) Bangsal Pembenihan

Tertutup, 6) Sarana Listrik dst. Sarana tersebut di bangun melalui dana DAK. Adapun peranannya adalah :

1. Sarana uji coba teknologi pembenihan
2. Sarana Pelatihan dan Pembinaan kegiatan Pembenihan air tawar
3. Sarana pemurnihan benih ikan air tawar untuk menghasilkan bibit ikan yang tahan terhadap penyakit

➤ **Kantor UPP**

Rumput laut sebagai salah satu hasil budidaya laut di Kabupaten Sinjai merupakan salah satu jenis rumput laut yang mempunyai kualitas yang cukup baik. Hal ini disebabkan tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh polusi udara sangat kurang. Ada beberapa kelompok pembudidaya rumput laut yang menjadi binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sinjai.

Oleh karena banyaknya kelompok yang menjadi binaan Dinas Kelautan dan Perikanan, maka dibentuklah satu wadah yang menjadi tempat berkumpulnya kelompok Pembudidaya Rumput Laut dengan nama Unit Pelayanan dan Pengembangan Rumput Laut (UPP), dengan beberapa pengurus yang menjadi pengelola unit tersebut.

Pada Tahun 2010 melalui Dana Alokasi Khusus dibangun sebuah bangunan sebagai kantor UPP dengan tujuan untuk lebih membuat pembudidaya rumput laut lebih bergiat dalam melaksanakan budidaya.

➤ **Excavator**

Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas lahan budidaya tambak di Kabupaten Sinjai, maka melalui Dana Alokasi Khusus Tahun 2010 telah diadakan satu unit excavator yang bertujuan membantu pembudidaya dalam memperbaiki sarana produksi sehingga hasil produksi lebih meningkat.

Pada tahun 2011 Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen Budidaya memberikan bantuan satu unit Excavator kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sinjai untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pembudidaya.

➤ **Lahan Tambak**

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki lahan tambak yang cukup luas sebagai salah satu bentuk tambak percontohan bagi pembudidaya di sekitarnya.

Pengelolaan lahan tambak tersebut dilakukan melalui pihak ketiga dengan cara disewakan.

C. Pengawasan dan Konservasi

Pengawasan dan konservasi melaksanakan tugas pada usaha penangkapan dan budidaya, serta bidang pengolahan. Khusus untuk pelaksanaan tugas pada kegiatan penangkapan, pengawasan dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan. Dalam kegiatan tugas pengawasan dilaut, petugas perikanan sering bekerja sama dengan Kepolisian dan Polisi Pamong Praja, terutama pada saat operasi lapangan dilakukan. Secara keseluruhan sarana dan prasarana pendukung Dinas Kelautan Kabupaten Sinjai seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.6.
Sarana dan Prasarana Pendukung
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai

No	Sarana/Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Pos Pengawas	1
2	Kapal Pengawasan (Speed Boat)	2
3	Garasi Speed Boat	1
4	Handy Talkie	2
5	Fish Finder	2
6	Pelampung	10
7	Tabung Pemadam	2
8	Tabung Pengawasan	3
9	Teropong	2
10	GPS	1

Sumber : Laporan Tahunan 2013

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1 Produksi Perikanan

Sejalan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai, maka pelaksanaan visi visi dalam mencapai sasaran kinerja adalah peningkatan produksi perikanan. Selama kurun waktu 2011 – 2013, produksi perikanan Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan sebesar 2,89 % per tahun, yakni dari 36.009,5 ton pada tahun 2011 menjadi 49.806,58 ton pada tahun 2013, seperti terlihat sebagai berikut :

Tabel. 2.7
Produksi Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2011-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun			Kenaikan Rata-Rata %
			2011	2012	2013	
Perikanan Budidaya						
a.	Target Daerah	ton	10.711.83	12.318.6	14.166.39	14,99
b.	Volume produksi	ton	8.872,67	12.983,22	20.838,63	53,41
c.	Kenaikan	%	82,83	105,39	147,09	33,77
Perikanan Tangkap						
a.	Target Daerah	ton	26.272	26.535	26.800	0,99
b.	Volume produksi	ton	27.136,9	27.940,15	28.845,45	3,10
c.	Kenaikan	%	103,29	105,29	107,63	2,07
	TOTAL	ton	36.009,5	40.923,37	49.806,58	2,89

Sumber: Statistik Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sinjai Tahun 2013

Dari data yang terlihat menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya mengalami pertumbuhan sebesar 53,41 % dari tahun 2011 – 2013. Target produksi yang direncanakan tahun 2008 – 2013 terealisasi sebesar (15,3 %). Produksi budidaya mengalami kenaikan terbesar pada tahun 2008 sebesar 33,878,45 ton dan mencapai produksi sebesar 135.355,60 ton pada tahun 2013, yang berarti kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan produksi dapat terpenuhi. Kenaikan produksi budidaya yang cukup tinggi tersebut khususnya untuk produksi rumput laut seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.8
Volume Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Sinjai

Rincian	Tahun (Ton)					Kenaikan Rata-Rata %
	2008	2009	2010	2011	2012	
Tambak						
Mujair	4,00	5,45	4,62	4,84	6,18	13,4
Bandeng	432,00	692,00	355,87	263,79	300,00	(0,1)
Kakap	4,00	2,10	1,95	2,92	3,03	(0,0)
Udang Windu	130,40	130,70	147,63	139,12	132,00	0,6
Udang Api-api	3,95	6,30	10,04	7,15	11,09	36,3
Rumput Laut	629,60	990,00	6.685,62	5.246,40	3.760,00	145,7
Kolam						
Mas	7,80	9,10	10,01	10,90	28,30	48,8
Nila			0,25		0,35	
Lele			0,09	0,12	0,17	
Sawah						
Mas	10,70	18,60	13,54	20,73	17,50	21,0
Nila	-	-	0,90	0,22	4,60	
Laut						
Rumput Laut	32.656,00	19.420,00	5.464,16	3.176,48	8.720,00	5,1
TOTAL	33.878,45	21.274,25	12.694,68	8.872,67	12.983,22	(15,3)

Sumber: Statistik Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sinjai 2013

Sementara untuk data produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan dari Tahun 2008 – 2013 sebesar 2,89 %

Tabel. 2.9
Volume Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Sinjai

Jenis Ikan	Volume Produksi (Ton)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Ikan Pelagis Besar	9.516,6	10.946,91	12.335,97	12.683,38	13.116,16
Ikan Pelagis Kecil	6.514,2	7.015,8	7.684,55	7.916,26	8.146,41
Ikan Dumersal/karang	3.904,79	3.537,36	2.373,54	2.113,85	2.184,59
Crustacea	429,32	442,97	368,99	270,83	248,87
Echinodermata	855,12	678,03	695,92	613,52	638,52
Mollusca	2.519,66	2.594,37	2.552,36	2.680,86	2.699,56
Tumbuhan/Tanaman Air	4,7	4,4	3,8	3,5	2,7
Lainnya	4,25	4,50	4,65	4,13	4,15
Total	23.748,6	25.897,68	26.814,26	27.512,90	27.400,15

Sumber: Statistik Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Sinjai 2013

Produksi perikanan tangkap dan budidaya menjadi pasokan dalam proses produksi ikan olahan. Selama kurun waktu 2008 – 2012, volume produk olahan mengalami kenaikan produksi dari 3.183 ton pada tahun 2008 menjadi 19.460 ton pada tahun 2012. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya ragam produk olahan bernilai tambah yang dihasilkan kelompok pengolah baik skala besar maupun UMKM dalam upaya preferensi konsumen terhadap diversifikasi produk perikanan bermutu, aman dikonsumsi dan memiliki nilai tambah.

Tabel. 2.10
Volume Produksi Olahan Kabupaten Sinjai

Rincian	Tahun (Ton)					Kenaikan Rata-Rata %
	2008	2009	2010	2011	2012	
Volume Hasil Olahan (Ton)	3.183	3.350	3.882	4.347	4.698	10,3

Sumber: Statistik Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Sinjai 2013

2.3.2 Konsumsi Ikan Perkapita (KIP)

Kabupaten Sinjai memiliki rata-rata konsumsi ikan per kapita pertahun sebesar 4,3 % pertahun dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 76 kg .

Tabel. 2.11
Rata-Rata Konsumsi Ikan Tahun 2008 – 2012

Rincian	Tahun					Kenaikan Rata-Rata %
	2008	2009	2010	2011	2012	
• Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	73	73	75	76	76	4,3

Pencapaian rata-rata konsumsi ikan perkapita di Kabupaten Sinjai yang terus mengalami kenaikan menggambarkan bahwa produk perikanan untuk dikonsumsi tersedia cukup, baik yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya. Masyarakat Kabupaten Sinjai terbukti memiliki tingkat konsumsi ikan yang tinggi dan didukung dengan kebijakan dan kampanye Gemar Makan Ikan mampu memberikan hasil yang signifikan.

2.3.3 Luas Kawasan Konservasi Perairan

Kabupaten Sinjai sebagai salah satu daerah yang terletak di kawasan Teluk Bone memiliki kawasan konservasi perairan yang dikenal dengan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang memiliki luas sebesar 68 Ha terdiri atas 4 (empat) Kawasan Konservasi yang dilindungi.

2.3.4 Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kawasan yang dikelola secara insentif. Dalam mendukung eksistensi pengelolaan kawasan tersebut maka diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Beberapa sarana dan prasarana kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Tahun 2008 – 2012

Indikator Kinerja	Tahun (Paket)									
	2008		2009		2010		2011		2012	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penyediaan Sarana dan prasarana kawasan budidaya	-	-	-	-	2	3	3	10	3	-
Persentase Peningkatan	-	-	-	-	-	150	-	333	-	-

2.3.5 Persentase Wilayah Perairan yang Bebas Illegal Fishing dan Kegiatan yang Merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Realisasi sasaran perairan kawasan Teluk Bone bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan pada tahun 2012 dari target sebesar 5 kasus telah tercapai sebesar 60 % dari target. Dibandingkan tahun 2008 dengan target presentase sebesar 12 kasus yang dapat terselesaikan sebesar 5

kasus atau 41,66 %. Peningkatan penyelesaian kasus illegal fishing menyebabkan kasus yang ada dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan laut.

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Tahun 2008 – 2012

Indikator Kinerja	Tahun (%)									
	2008		2009		2010		2011		2012	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Wilayah Perairan Bebas Illegal Fishing dan Kegiatan yang Merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (kasus)	12	5	10	5	8	3	7	3	5	3
Persentase Peningkatan		41,66		50		37,5		42,85		60

Sumber : Bidang Pengawasan dan Pengendalian SDKP Tahun 2013

Dalam rangka penanggulangan Illegal Fishing dilaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, khususnya operasi kapal pengawas baik secara mandiri maupun melalui operasi bersama dengan instansi penegak hukum. Dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan dari kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan dibentuk dan dibina Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang diberdayakan secara mandiri. Pencapaian jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas yang aktif Tahun 2012 telah tercapai sebesar 5 Kelompok dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 5 Kelompok.

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Kelompok Pengawas yang Aktif
Tahun 2008 – 2012

Indikator Kinerja	Tahun (Klp)									
	2008		2009		2010		2011		2012	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah POKMASWAS	5	2	5	2	5	3	5	4	5	5
Persentase Peningkatan		40		40		60		80		100

Sumber : Bidang Pengawasan dan Pengendalian SDKP Tahun 2013

2.3.6 Pengembangan SDM Aparat dan Masyarakat Usaha Perikanan dalam mendukung Peningkatan Produksi Perikanan

Dalam rangka peningkatan produksi perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaetn Sinjai telah melakukan beberapa upaya untuk mencapai target sasaran yang diinginkan. Beberapa upaya strategis dilakukan untuk mewujudkannya, salah satunya adalah pengembangan SDM Aparat dan Masyarakat. Berdasarkan data dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan penilaian yang sama dan diberikan pada masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan serta atas berbagai peran yang mereka lakukan untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender. Keterwakilan perempuan terhadap laki-laki dilakukan untuk pengembangan SDM.

Keterwakilan perempuan dalam pengembangan SDM mempunyai nilai ketimpangan gender terutama pada pengembangan SDM untuk nelayan dan pembudidaya, hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya budaya patriarki yang lebih mendominasi peran laki-laki sebagai pencari nafkah sehingga peran di luar rumah diprioritaskan untuk laki-laki sehingga akses perempuan menjadi rendah untuk ikut berpartisipasi, selain itu kurangnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan sehingga jadwal kegiatan seringkali tidak sesuai dengan waktu luang dari perempuan untuk mengikuti kegiatan di luar rumah. Keengganan wanita nelayan untuk masuk dalam kegiatan produktif juga disebabkan antara lain oleh budaya masyarakatnya yang masih melarang wanita untuk bekerja. Bagi mereka perempuan hanya bertugas di dapur dan mengurus anak-anak. Namun seiring dengan tekanan ekonomi yang semakin berat wanita semakin terdorong untuk meringankan beban keluarganya, sehingga mereka ikut serta dalam kegiatan produktif. Pekerjaan yang dilakukan istri nelayan di pasar sebagai pekerjaan sampingan sekaligus untuk menambah penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Keikutsertaan perempuan nelayan dalam kegiatan produktif di bidang perikanan masih minim padahal perempuan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pembangunan pesisir.

Beberapa langkah yang akan ditempuh untuk meminimalisasi ketimpangan tersebut diantaranya (i) penyiapan data yang mendukung analisis gender berupa pemisahan data perempuan dan laki-laki; (ii) mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, diantaranya dengan membuat jadwal kegiatan yang membuat perempuan dapat terlibat; dan (iii) meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur untuk mengarusutamakan gender. Peningkatan kualitas sumberdaya

manusia (SDM) adalah kunci untuk keberhasilan pembangunan nasional jangka panjang.

2.3.7 Pengembangan Penyuluhan Perikanan

Penyuluh perikanan merupakan barisan terdepan dalam melakukan pelayanan bagi masyarakat khususnya pada bidang kelautan dan perikanan, dimana program-program yang akan dilaksanakan lebih cepat tersampaikan melalui penyuluh perikanan. Penyuluh perikanan memiliki peran yang sangat penting dalam laju pembangunan nasional yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

Beberapa hal yang telah dilakukan seperti: (1) penambahan jumlah penyuluh perikanan melalui program impassing, (2) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dengan pengembangan keterampilan dan pengetahuan penyuluh, (3) Peningkatan sarana dan prasarana penyuluh. Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan telah dilakukan dengan melengkapi beberapa sarana dan prasarana penyuluh seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Pengembangan Penyuluhan Perikanan
Tahun 2008 – 2012

Indikator Kinerja	Tahun (Klp)									
	2008		2009		2010		2011		2012	
	Targe t	Realisa si	Targe t	Realisa si	Targe t	Realisa si	Targe t	Realisa si	Targe t	Realisa si
Penyediaan Sarana Penyuluh	-	-	14	-	5	14	10	-	10	-
Persentase Peningkatan	-	-	-	-	-	280	-	-	-	-

Kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Kelautan dan Perikanan. Kinerja pelayanan berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan pelayanan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut di dukung dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD II). Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
PENDAPATAN DAERAH												
Pendapatan Asli Daerah												
- Hasil retribusi daerah	85.340.000	50.340.000	55.374.000	203.454.000	193.800.000	54.724.000	57.565.000	125.453.800	221.932.000	291.838.000	58	57,9
- Retribusi Jaaa Usaha	49.290.000	44.340.000	48.774.000	52.000.000	151.000.000	38.815.000	44.540.000	49.455.000	109.970.000	205.838.000	49	58,8
- Lain-lain PAD yang Sah	36.050.000	6.000.000	6.600.000	151.454.000	42.800.000	15.909.000	13.025.000	75.998.000	111.962.000	86.000.000	512	122,4
Belanja tidak langsung	1.245.193.542		1.797.291.463	1.829.696.775	1.920.267.384	1.245.193.542	1.580.992.384	1.797.291.463	1.829.106.067	1.893.960.384		11
Belanja langsung	5.117.392.600		6.345.159.000	4.422.790.350,5	4.806.235.052	4.645.154.284	4.091.836.588	6.497.527.901	3.880.625.854	4.760.862.938		7
- Belanja Pegawai	169.505.000		98.095.000	120.575.000	99.295.000	136.995.000	109.930.000	865.850.000	96.565.000	106.095.000		147
- Belanja Barang dan jasa	867.748.600		488.550.000	1.180.346.750,5	2.529.298.852	490.044.285	852.385.438	429.127.635	343.021.370	2.486.844.938		157
- Belanja Modal	4.080.139.000		5.762.514.000	3.121.868.600	2.177.641.200	4.018.114.999	3.129.521.150	5.202.550.266	3.441.039.484	2.167.923.000		-7
Total	6.447.926.142		8.197.824.463	6.455.941.125,5	6.920.302.432	5.945.071.826	5.730.393.972	8.420.273.164	5.931.663.921	6.946.661.322		8

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai

Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai memiliki tantangan dan peluang. Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi terhadap perencanaan lima tahun ke depan. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

2.4.1 Tantangan

- a. Ketergantungan masyarakat Sinjai yang cukup tinggi terhadap SDA dan lingkungan pesisir dan laut serta belum termanfaatkannya secara optimal sumberdaya jasa kelautan.
- b. Degradasi lingkungan sensitive (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun) dan penurunan mutu perairan.
- c. Masih maraknya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (destructive fishing) dan potensi konflik nelayan yang sangat tinggi.
- d. Sebahagian besar asset nelayan dan petambak tidak bersertifikat, sehingga sulit mengakses perbankan atau lembaga keuangan
- e. Pengembangan teknologi produksi relative lambat dan stagnan.
- f. Infrastruktur sektor perikanan dan kelautan (sarana budidaya, sarana pengolahan dan armada penangkapan) masih terbatas.
- g. Serangan hama dan penyakit belum dapat dikendalikan secara maksimal serta masih maraknya penggunaan antibiotik dan bahan terlarang lainnya.
- h. Kesenjangan gender terhadap pembinaan dan pengembangan SDM kelompok baik di daerah pesisir maupun pada daerah pulau-pulau kecil
- i. Masih banyaknya fasilitas pemerintah yang tidak berfungsi secara optimal, misalnya TPI, PPI dll.
- j. Masih terbatasnya sarana produksi yang ada di masyarakat yang telah tersertifikasi seperti tambak, unit pembenihan, kapal nelayan dan sarana produksi lainnya

- k. Kemiskinan berkepanjangan secara struktural, kultural terutama di desa nelayan
- l. Kerusakan lingkungan yang cukup parah (kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir, pencemaran-sedimentasi dan abrasi pantai), perubahan iklim serta ancaman bencana alam (banjir, longsor, abrasi dan instrusi air laut).
- m. Kesadaran masyarakat atas kelestarian lingkungan yang sangat rendah dan lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcement*) serta rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.
- n. Pengetahuan dan keterampilan teknis aparat masih rendah.
- o. Lemahnya dukungan perbankan dan lembaga keuangan.
- p. Mutu produk yang masih rendah, Sistem pengendalian dan pengawasan mutu belum berjalan dengan baik.
- q. Potensi konflik pemanfaatan ruang sangat besar (konflik Institusional, konflik sosial, konflik teknologi dll)

2.4.2 Peluang

- a. Dukungan pemerintah melalui regulasi dan swasta terhadap pengembangan usaha perikanan dan kelautan semakin baik.
- b. Peluang usaha dibidang perikanan semakin terbuka.
- c. Penerapan CBIB, CPIB, sertifikasi tanah dan sertifikasi tambak
- d. Dukungan permodalan oleh pemerintah, swasta dan perbankan dengan bentuk kredit murah dan pola kemitraan.
- e. Kelembagaan nelayan, pembudidaya semakin berkualitas dan berkembang.
- f. Kualitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan yang berbasis Gender semakin meningkat dan bertambah.
- g. Pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya alam yang optimal dan bertanggung jawab.
- h. Pencegahan degradasi atau kerusakan lingkungan semakin intensif.
- i. Peningkatan mutu dan keamanan produk hasil perikanan.
- j. Peningkatan kapasitas melalui inovasi teknologi, modal, pasar, penentuan kawasan dan sinkronisasi kebijakan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan menggambarkan kinerja layanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai yang senantiasa menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak dapat diabaikan. Isu yang diuraikan yaitu keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan memberikan dampak yang signifikan di masa datang dan akan berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai seperti yang termuat di tabel bawah ini.

Tabel.3.1
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persaingan Pasar Global dan Industrialisasi	Rendahnya Produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan	Keterbatasan infrastruktur perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan hasil kelautan & perikanan: Jaringan Saluran Irigasi, Jalan Produksi Tambak, Air bersih, Listrik ,BBM, Sistem Rantai Dingin, Pelabuhan Perikanan	Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah
2	Persyaratan kualitas/mutu produk perikanan seperti persyaratan label, kemasan dan keamanan produk	Belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu ke hilir	Kemiskinan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan	Kesenjangan Gender pada SDM kelompok Usaha Perikanan
3	Proteksi produksi perikanan oleh negara maju	Persaingan Konsumsi protein hewan lain	Kualitas armada kapal penangkap ikan masih rendah	
4	Illegal Fishing	Penurunan Stok Ikan	Terbatasnya akses permodalan untuk usaha perikanan	
5	Isu Lingkungan		Inovasi teknologi pada usaha perikanan	

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Sinjai

Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Sinjai ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

Tabel. 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah
Daerah Kabupaten Sinjai

Visi Kabupaten Sinjai :				
Terwujudnya Sinjai Bersatu Yang Sejahtera, Unggul Dalam Kualitas Hidup, Terdepan Dalam Pelayanan Publik				
No	Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Sinjai	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sinjai Bersatu yang Sejahtera Misi 1 : Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan	a. Belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu ke hilir b. Struktur dan Kualitas prasarana dan sarana penangkapan ikan c. Hama dan Virus Penyakit d. Mutu Produksi perikanan kurang berdaya saing e. Kualitas SDM f. Persaingan konsumsi protein hewan lain g. Degradasi sumberdaya Ekosistem dan Sumberdaya Ikan h. Kesenjangan Gender dalam pembinaan kelompok usaha perikanan	• Pengelolaan potensi belum berbasis kawasan • Pembenahan Sistem dan Manajemen usaha kelembagaan • Kurangnya data dan Informasi pasar dalam pengembangan usaha • Modal Usaha dan Akses Permodalan	• Potensi sumberdaya yang cukup besar • Penerapan teknologi serta membangun jejaring bisnis • Pengendalian pemanfaatan Ekosistem Laut , Perairan Umum dan Sumberdaya Ikan • Rekstrukturisasi prasarana, sarana dan pengembangan teknologi penangkapan ikan • Revitalisasi Sistem Produksi • Dukungan Pembiayaan dan Komitmen • Peningkatan mutu dan jaminan keamanan pangan
2	Terdepan dalam Pelayanan Publik Misi 3 : Mewujudkan manajemen pemerintahan yang professional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas.			

Dari 3 Misi Pemerintah Kabupaten Sinjai, terdapat 2 Misi yang didukung oleh pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai yaitu :

- Misi ke-1 ” ***Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan*** ” .

Pada pelaksanaan Misi ke-1 tersebut diarahkan pada Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, Pengelolaan Perikanan Tangkap dan

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan , Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan . Program-program tersebut dalam pelaksanaannya mengutamakan pengarusutamaan gender.

- Misi ke-3 ” ***Mewujudkan manajemen pemerintahan yang professional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas***”

Pada pelaksanaan Misi ke-3 diarahkan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Capaian Kinerja.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Analisis Renstra K/L dan SKPD Kabupaten ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai, maka perlu dilakukan analisis

Pencapaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai sudah baik secara nasional dan regional. Namun berdasarkan hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi tahun rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Popinsi, maka perlu diketahui faktor-faktor penghambat maupun pendorong. Untuk mengidentifikasi faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sinjai	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Produksi Perikanan (ton)	<ul style="list-style-type: none"> Struktur dan kualitas prasarana dan sarana penangkapan ikan Maraknya kegiatan penangkapan ikan secara illegal Rusaknya kelestarian lingkungan akibat illegal fishing Keterwakilan jumlah perempuan dalam pengembangan SDM usaha perikanan masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan prasarana penangkapan yang digunakan nelayan masih tradisional Mata pencaharian nelayan bergantung pada SDA laut dan perairan umum Pola budidaya masih tradisional Kualitas SDM masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Sumberdaya Kelautan memiliki Potensi cukup besar Potensi Kelembagaan Dukungan Pembiayaan dan Komitmen Penganggaran Kebijakan ekonomi serta iklim sosial politik yang kondusif
2	a.Perikanan Tangkap			
	b.Perikanan Budidaya			
3	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)			
4	Luas Kawasan konservasi laut dan perairan (ha per tahun)			
5	Jumlah Pulau-Pulau yang dikelola (pulau per tahun)			
6	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Pokmaswas yang aktif (Klp)			

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai. Dibandingkan dengan struktur dan pola eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang. Sehingga rancangan program beserta targetnya dapat disusun sesuai dengan RTRW tersebut.

Dalam rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis terlihat bahwa pola penggunaan dan pemanfaatan kawasan dititik beratkan pada konsep agribisnis perikanan yang terdiri dari sub-sistem agribisnis hulu (*up-streem agribusiness*) berupa ragam kegiatan industri dan perdagangan sarana produksi perikanan, sub-sistem budidaya/penangkapan (*on-farm agribusiness*) yang menghasilkan komoditas perikanan, sub-sistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) berupa ragam kegiatan industri pengolahan hasil perikanan dan pemasaran, dan sub-sistem jasa penunjang (*supporting*

institution) yang mendukung pengembangan semua sub-sistem, meliputi : perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan, dan lain-lain. Semua sub-sistem berada dalam simpul keterkaitan fungsional yang saling mendukung dalam eksistensi sistem yang terpadu dalam berakselerasi mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Struktur tata ruang menentukan kualitas interkoneksi antar simpul-simpul wilayah dalam kawasan, sekaligus merupakan suatu komunitas yang utuh yang memungkinkan sebuah kawasan berartikulasi secara optimal terhadap dinamika lingkungan eksternalnya. Untuk mengintegrasikan titik-titik ruang, maka dibuat struktur ruang berdasarkan fungsinya masing-masing. Secara garis besar, rencana struktur ruang Kawasan Minapolitan di Kabupaten/Kota terdiri atas beberapa orde, yaitu : Pusat Satuan Kawasan Perikanan, Pusat Distrik Minapolitan (pusat pertumbuhan), Kota Tani Utama/Minapolis (sentra produksi), wilayah-wilayah hinterland, dan kota pemasaran (outlet).

Mengacu kepada penajaman visi dan misi pembangunan daerah maka perspektif tujuan telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi dalam rangka pengembangan kawasan minapolitan dan industrialisasi dengan mengakselerasi pencapaian visi pembangunan nasional dan daerah. Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032, Rencana pengembangan kawasan strategis nasional dan kawasan budidaya nasional dengan sektor unggulan Perikanan meliputi :

1. Kawasan Andalan Darat

- a. Kawasan andalan Budidaya Air Payau
- b. Kawasan andalan Budidaya Air Tawar

2. Kawasan Andalan Laut

- Kawasan andalan Laut Pasiloangnge dan sekitarnya
- Kawasan andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya

3. Kawasan potensil yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Dimanfaatkan untuk budidaya unggulan meliputi

- a. Kawasan potensil budidaya Rumput Laut
- b. Kawasan potensil perikanan tangkap Teluk Bone

4. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang

Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata alam

- b. Ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakar; dan
- c. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan atau mencemari ekosistem bakau.

Peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam
- b. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat
- c. Ketentuan pelarangan kegiatan budidaya di zona inti
- d. Ketentuan pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.

Peraturan zonasi untuk terumbu karang disusun dengan memperhatikan

- a. Pemanfaatan untuk pariwisata bahari
- b. Ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang
- c. Ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf b yang dapat menimbulkan pencemaran air

5. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan perikanan disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan ruang untuk pemukiman pembudidaya dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah
- b. Pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan atau kawasan hijau
- c. Pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan industri disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya
- b. Pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukkan industri

Kabupaten Sinjai memiliki sumber daya pesisir yang cukup potensial dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

pendapatan daerah. Berbagai potensi tersebut seperti perikanan, pariwisata, perhotelan, kepelabuhanan, dan industri pesisir. Mengingat potensi yang besar tersebut, maka dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu (Integrated Coastal Management) dengan melibatkan semua stakeholder terkait. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir belum dilaksanakan secara optimal.

Wilayah pesisir Teluk Bone telah membentuk budaya tradisional masyarakat yang telah berlangsung terus-menerus selama bertahun-tahun dengan mengelola sumberdaya pesisir yang mencakup berbagai jenis ikan dan kerang-kerangan sebagai sumber protein hewani, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan estuaria.

Potensi sumber daya pesisir tersebut telah mengalami degradasi ekosistem terutama populasi ikan dan biota lainnya yang cukup terdapat didalamnya sebagai akibat dari dampak laju pertumbuhan penduduk, kegiatan pembangunan fisik, peningkatan sampah organik dan anorganik serta kegiatan-kegiatan ilegal dalam industri perikanan, pertambangan, dan pembalakan.

Peningkatan konsumsi dan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang berlebihan, tanpa mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungannya, akan semakin menurunkan daya lingkungan dan nilai serta keberadaan potensi sumberdaya pesisir, sehingga mengancam potensi ekonomi dan sosial budaya yang terkandung didalamnya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan, karena sebagian masyarakat lokal yang berdomisili di wilayah pesisir Teluk Bone di Kab. Sinjai bermata pencaharian sebagai nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya pesisir, khususnya kegiatan perikanan sebagai sumber pendapatan utamanya. Faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi kecenderungan masa depan :

1. Meningkatnya degradasi ekosistem sumberdaya alam diwilayah pesisir dengan meningkatnya eksploitasi terutama alih fungsi (konversi) untuk tujuan lain seperti tambak dan pemukiman
2. Penangkapan ikan

Perkiraan dampak negatif dan positif faktor pendorong terhadap kecenderungan masa depan dimana saat ini ekosistem dominan diwilayah pesisir Teluk Bone seperti :

1. Kondisi terumbu karang masih cukup baik sampai rusak berat.
2. Pada umumnya kerusakan tersebut hancur akibat masih maraknya kegiatan ilegal fishing dan pola penangkapan Ikan yang tidak ramah lingkungan yang

dilakukan para nelayan untuk menangkap ikan sehingga sejumlah habitat lainnya yang berada disekitar kawasan lokasi penangkapan ikanpun ikut rusak.

3. Masih terdapat terumbu karang yang dapat diselamatkan. Hal tersebut disebabkan karena lokasinya berada daerah pesisir yang dilindungi pemerintah sehingga akses masyarakat terbatas pada lokasi – lokasi tersebut.

Tabel.3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sinjai	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan Kawasan			
2	Produksi Perikanan (ton)			
	a.Perikanan Tangkap	Struktur dan kualitas prasarana dan sarana penangkapan ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana penangkapan yang digunakan nelayan masih tradisional • Mata pencaharian nelayan bergantung pada SDA laut dan perairan umum 	Pengendalian pemanfaatan ekosistem laut, perairan umum dan sumberdaya ikan melalui restrukturisasi prasaranan, sarana dan pengembangan teknologi penangkapan ikan
	b.Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Irigasi terbatas • Pemanfaatan Lahan yang tidak sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> • Pola budidaya masih tradisional • Kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi Lahan Perikanan Budidaya • Dukungan Pembiayaan • Penetapan Kawasan Minapolitan
3	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Zonasi Kawasan dan Ruang untuk sektor unggulan perikanan belum terakomodir • Sistem Logistik Ikan 	Belum tersosialisasinya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan Regulasi kebijakan seperti Perda, Pergub dan lain sebagainya • Penataan perencanaan dan sinergitas antar lintas sektor
4	Luas Kawasan konservasi laut dan perairan (ha per tahun)	Lemahnya kerangka hukum dalam hal pengaturan sumberdaya Pesisir	Belum tersosialisasinya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan Regulasi kebijakan seperti Perda, Pergub dan lain sebagainya • Penataan perencanaan dan sinergitas antar lintas sektor
5	Jumlah Pulau-Pulau yang dikelola (pulau per tahun)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Tata Ruang tidak berdasarkan kebutuhan dan urgensi • Kurangnya informasi dan data meliputi data fisik, ekonomi dan sosial terutama gambaran karakteristik kawasan dipulau tersebut • Kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya 	Koordinasi lintas sektor dalam hal penataan dan pemulihan ekosistem	Mempertahankan Mangrove yang ada sekaligus mengembangkannya sebagai usaha perlindungan dan pemulihan ekosistem wilayah
6	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas yang aktif (Klp)	Kualitas Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • SDM Kelompok Pengawas yang belum memahami Tugas dan Fungsi Kelembagaan • Sarana pengawasan yang belum memadai • Kelembagaan yang belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek secara periodik • Dukungan Pembiayaan

Situasi terburuk yang diperkirakan akan terjadi jika semakin meningkatnya kegiatan illegal fishing dan pola penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dikhawatirkan ketergantungan ekosistem laut akan punah dan kerusakan habitat laut pun diyakini akan berdampak pada kehidupan disekitarnya khususnya pada nelayan.

Tabel.3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai
berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sinjai	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Produksi Perikanan (ton)			
	a.Perikanan Tangkap	Maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bus sehingga merusak lingkungan dan ekosistem sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan Kapasitas SDM nelayan terhadap teknologi alat tangkap, target tangkapan, & daerah penangkapan ikan masih rendah • Teknologi penangkapan ikan sangat konvensional dan sulit berubah. • Sarana dan pra-sarana tempat pendaratan ikan serta fasilitas kebutuhan melaut (operasi penangkapan ikan) masih sangat terbatas • Penanganan dan pengolahan ikan belum menjadi perhatian yang serius (terkesan seadanya) • Mekanisme dan jaringan pemasaran masih sangat konvensional, dengan metode transaksi langsung 	<ul style="list-style-type: none"> • Semangat etos kerja nelayan yang sangat kuat • Potensi sumberdaya perikanan belum dimanfaatkan secara optimal • Kebutuhan pasar akan pangan sumberdaya ikan semakin meningkat • Perhatian terhadap Perbaikan infrastruktur pendukung serta sarana dan prasarana perikanan tangkap semakin besar
	b.Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Hama dan Virus • Anomali Iklim • Kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan tambak baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Pola budidaya masih tradisional • Kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pembiayaan • Penyuluhan
2	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	Rusaknya ekosistem akan mempengaruhi jumlah stock ikan sehingga akan berpengaruh pada ketersediaan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Eksploitasi yang berlebihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan • Penyadaran Masyarakat (Public Awareness)
3	Luas Kawasan konservasi laut dan perairan (ribu ha per tahun)	<ul style="list-style-type: none"> • Penebangan hutan mangrove untuk bahan baku sebagai alternatif usaha masyarakat pesisir terakomodir 		

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Luas Kawasan konservasi laut dan perairan (ha per tahun)	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi pengelolaan lingkungan terkait konservasi terakomodir belum 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi lintas sektor dalam hal penataan dan pemulihan ekosistem (BLH, Dishut dan Bapedalda) belum sepenuhnya dilakukan Minimnya keikutsertaan masyarakat pesisir yang memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dalam pengelolaan SD pesisir dan kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya konservasi untuk mengembalikan Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Mempertahankan Mangrove yang ada sekaligus mengembangkannya sebagai usaha perlindungan dan pemulihan ekosistem wilayah Menurunnya SD yaitu populasi ikan
5	Jumlah Pulau-Pulau yang dikelola (pulau per tahun)	Degradasi lingkungan pesisir dan laut	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan iklim Keterbatasan akses dan jangkauan Konflik kepentingan tidak hanya terjadi antar sektoral dalam pemerintahan tetapi juga dgn masyarakat setempat dan pihak swasta sehingga tujuan dan pengembangan potensi sumberdaya pesisir dan lautan tidak akan tercapai 	Pemanfaatan SD pesisir dan pulau2 kecil yg intensif, optimal dan terkendali dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yg tinggi yg juga dapat memberikan keuntungan yg besar bagi kesejahteraan masyarakat pesisir
6	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas yang aktif (Klp)	Eksplotasi sumberdaya yang berlebihan	Kelembagaan kelompok yang belum sepenuhnya aktif dalam pengawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Kearifan lokal Penyadaran Masyarakat (Public Awareness)

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam penentuan Isu-Isu Strategis , maka perlu mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai ditinjau dari :

3.5.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai

Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka menjamin ketersediaan, keamanan pangan dan mutu hasil perikanan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan didukung oleh beberapa unit kerja seperti Balai Benih Ikan Palangka, Balai Benih Ikan Tassililu, dan Pos Pengawas.

3.5.2 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Sasaran Strategis pada Renstra K/L yaitu Pengembangan sentra industri kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan dan menerapkan teknologi inovatif dengan mutu dan keamanan konsumsi terjamin dengan sasaran target selama lima tahun yaitu :

1. Produksi perikanan sebesar 18,49 juta ton
2. Konsumsi ikan per kapita sebesar 35,14 kg/kapita/tahun
3. Volume produk olahan hasil perikanan sebesar 5,0 juta ton
4. Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan sebesar 900 ribu ha
5. Jumlah pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar yang dikelola sebanyak 60 pulau
6. Persentase wilayah perairan yang bebas *IUU Fishing* dan kegiatan-kegiatan yang merusak sebesar 51%

3.5.3 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kabupaten

1. Peningkatan Produksi Perikanan tahun 2008 sebesar 58.153,05 ton menjadi 270.294,45 ton pada tahun 2013
2. Konsumsi Ikan (kg/kap) tahun 2008 sebesar 73 kg/kap menjadi 76 kg/kap pada tahun 2013
3. Jumlah Tenaga Kerja tahun 2008 sebesar 12.335 orang menjadi 12.304 orang pada tahun 2013

3.5.4 Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan industrialisasi dan kawasan minapolitan, maka kawasan dikembangkan melalui :

- a) Mengembangkan komoditi unggulan dan komoditi penunjang melalui sistem agribisnis dengan pola klaster (*cluster*).
- b) Mengelompokkan dan menentukan struktur ruang berdasarkan keunggulan masing-masing wilayah dalam kawasan.
- c) Mengembangkan prasarana dan sarana yang dapat meningkatkan sinergitas kegiatan dalam kawasan.
- d) Mengelompokkan dan menentukan pola ruang kawasan berdasarkan zona-zona kawasan.

3.5.5 Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai

Sesuai dengan klausul yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen pendukung dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. KLHS merupakan *self assesment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang diusulkan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLSH diperlukan karena prinsip pembangunan berkelanjutan perlu terintegrasikan dalam pengambilan keputusan melalui informasi yang lebih komprehensi tentang lingkungan hidup. Fakta menunjukkan bahwa laju degradasi sumberdaya lahan dan kualitas lingkungan hidup semakin meningkat, dan umumnya bersifat kausalitas lintas wilayah dan antar sektor. Oleh karena itu, diperlukan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang memungkinkan penyelesaian masalah yang bersifat berjenjang (dari pusat ke daerah), lintas wilayah dan antar sektor. Salah satu sumber permasalahan degradasi sumberdaya lahan dan kualitas lingkungan hidup berawal dari proses pengambilan keputusan, sehingga perlu upaya penanggulangan degradasi sumberdaya lahan dan kualitas lingkungan hidup .

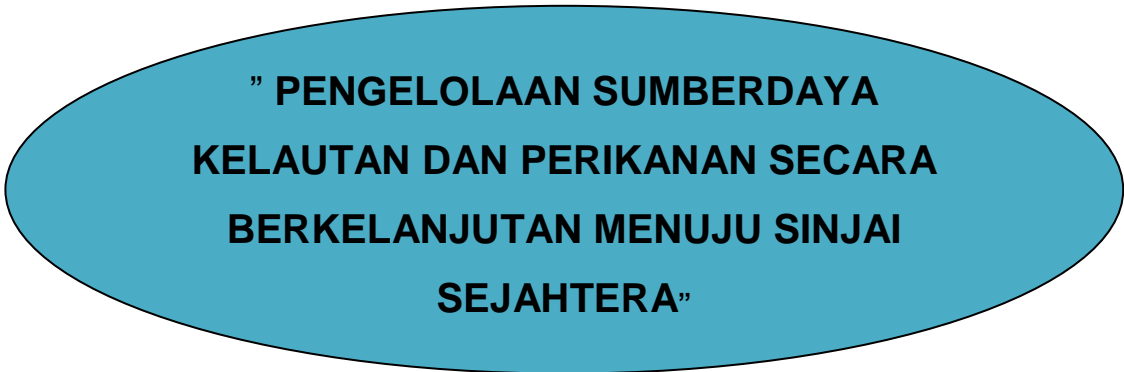
BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan

A. Pernyataan Visi

Pernyataan visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Perumusan Visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah (PPD) untuk menemukan perwujudan visi. Berbagai permasalahan pembangunan yang berhubungan layanan atau peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan dirumuskan berdasarkan tindak lanjut hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sebagai organisasi pemerintah yang bertugas melayani masyarakat dibidang Kelautan dan Perikanan, maka visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai dititik beratkan pada pengembangan sektor kelautan dan perikanan, Sehingga pernyataan Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai adalah :



**” PENGELOLAAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN SECARA
BERKELANJUTAN MENUJU SINJAI
SEJAHTERA”**

Penjelasan visi :

- ✓ ***Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan*** Merupakan Proses Pengelolaan Potensi Sumberdaya Alam Kelautan dan Perikanan yang Terus Menerus Untuk Lebih Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;

- ✓ **Berkelanjutan** bahwa Kegiatan Ekonomi Disektor Kelautan dan Perikanan Dapat Berlangsung Terus Menerus Sebagai Basis Ekonomi Masyarakat Sinjai dan Dapat Menyesuaikan Dengan Tuntutan Kondisi Ke Depan Dengan Tetap Memperhatikan Azas Kelestarian Lingkungan;
- ✓ **Sinjai Sejahtera** Merupakan Tekad dan Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai dalam Menyelenggarakan Pembangunan dan Membawa Masyarakat Sinjai Ke Arah Peningkatan Kesejahteraan, Menyikapi Berbagai Perubahan Lingkungan Internal dan Eksternal Serta Dinamika Masyarakat yang Semakin Berkembang, Sehingga Sinjai Seajar dengan Daerah Maju Lainnya di Indonesia.

Visi tersebut merupakan penjabaran dari Visi Pemerintah Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel . 4.1.
Penjelasan Visi Bupati Sinjai

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
” Terwujudnya Sinjai Bersatu Yang Sejahtera, Unggul Dalam Kualitas Hidup, Terdepan Dalam Pelayanan Publik”	Sinjai Bersatu yang Sejahtera	Dengan semangat persatuan dan kesatuan serta kebersamaan membangun Sinjai dalam meningkatkan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pemanfaatan potensi Derah yang berwawasan lingkungan.
	Unggul Dalam Kualitas Hidup	Masyarakat Sinjai terdepan dalam Pendidikan, Kesehatan, rukun dalam hidup beragama, serta rukun dan damai dalam berbagai aspek kehidupan
	Terdepan dalam Pelayanan Publik	masyarakat Sinjai mendapatkan jaminan pelayanan yang cepat, tepat dan yang terbaik dengan dukungan kualitas birokrasi yang andal, manajemen tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelayanan dari Aparatur yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

B. Pernyataan Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, merupakan kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Proses perumusan misi dilakukan dengan memperhatikan

masuk dari pihak yang berkepentingan (stake holder) dan memberikan peluang perubahan sesuai dengan perkembangan yang dihadapi. Sehingga pernyataan misi yang wajib dijadikan pegangan pelaksanaan tugas seluruh aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai adalah :

MISI I : Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan

MISI II : Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya Kelautan dan Perikanan

MISI III : Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan

MISI IV : Mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan yang terampil, profesional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan misi sebagai berikut :

- ✓ **Misi 1** : Meningkatkan dan mengembangkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berbasis ekonomi kerakyatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat khususnya nelayan dan pembudidaya ikan;
- ✓ **Misi 2** : Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga sumberdaya alam dengan melakukan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat merusak lingkungan sehingga tercipta pemanfaatan sumberdaya alam yang ramah lingkungan;;
- ✓ **Misi 3** : Meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan mengutamakan potensi lokal sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal dan membuka peluang usaha seluas – luasnya dengan tetap mengedepankan pelayanan kepada;
- ✓ **Misi 4** : Peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan dalam rangka menciptakan SDM yang memiliki jiwa usaha dan inovasi bidang kelautan dan perikanan serta menciptakan pemerintahan yang memiliki jiwa good governance, yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik.

Misi Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan upaya untuk mewujudkan keadaan atau kondisi yang diinginkan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dan memiliki keterkaitan dengan Visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel. 4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	➤ Meningkatkan Kemakmuran Ekonomi Dan Taraf Kehidupan Masyarakat ➤ Meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan ➤ Meningkatkan Sistem peringatan dini dan penanganan tanggap darurat	➤ Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan serta Pengelolaan Sumberdaya Laut, P3K ➤ Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur ➤ Pemberdayaan masy. Pesisir skala mikro khususnya Koperasi Perikanan dan Koperasi Usaha Mikro berorientasi pada usaha kelautan dan Perikanan ➤ Peningkatan sistem peringatan dini dan penanganan tanggap darurat	Volume produksi Perikanan	43.432	49.039	50.940	53.660	56.470
			1. Perikanan Budidaya	14.933	20.112,39	21.434,78	23.565,2	25.923,78
			2. Perikanan Tangkap	28.498,95	28.926,43	29.504,95	30.095,04	30.546,46
			Nilai Produksi Perikanan	388.088.384.000	361.617.009.229	410.935.494.000	424.630.156.000	437.539.229.000
			1. Perikanan Budidaya	31.851.504.000	36.629.229	42.123.614.000	48.442.156.000	55.708.479.000
			2. Perikanan Tangkap	356.236.880.000	361.580.380.000	368.811.880.000	376.188.000.000	381.830.750.000
			Jumlah sarana & prasarana yang tersedia					
2	➤ Meningkatkan kelestarian lingkungan	➤ Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan	Luas Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)	25	25	25	25	25
			Jumlah pulau-pulau kecil diberdayakan dalam pengelolaan dan konservasi kawasan (%)	33,33	33,33	44,4	44,4	44,4
			Jumlah kasus penyelesaian dan penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu	1 kasus	2 kasus	2 kasus	2 kasus	2 kasus
			Jumlah POKMASWAS yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan	3 klp	3 klp	4 klp	4 klp	5 klp

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	➤ Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan keunggulan lokal dan sinergitas regional, nasional dan global	➤ Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan ➤ Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat ➤ Meningkatnya pemasaran hasil produksi perikanan yang mempunyai daya saing ➤ Meningkatnya pengelolaan pemasaran produksi perikanan	✓ Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran (unit)	10	200	200	200	300
			✓ Konsumsi Ikan Perkapita (kg/kap/thn)	76	76	76	77	77

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan lapangan pekerjaan dan usaha perikanan ✓ Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih dengan penataan sistem kelembagaan pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatnya keterampilan dan inovasi pelaku usaha kelautan dan perikanan ➢ Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur ➢ Meningkatnya kemudahan publik mengakses dan informasi pembangunan daerah ➢ Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik 	Jumlah tenaga kerja dengan pengarusutamaan Gender :	13.861	14.026	14.126	14.331	14.474
			1. Nelayan Laut (orang)	8.566	8.651	8.653	8.735	8.820
			2. Pembudidaya (orang)	3.879	3.917	3.956	3.994	4.010
			3. Pengolahan (orang)	631	649	669	711	723
			4. Pemasar Ikan (orang)	725	749	768	801	821
			5. Jumlah Pelaku usaha mikro (orang)	60	60	80	90	100
			Persentase dokumen perencanaan program kegiatan yang terintegrasi, tepat waktu, dan akuntabilitas kinerja dinas serta laporan tahunan dan statistik	20%	20%	20%	20%	20%
			Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor, pengelola keuangan dan administrasi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
			Persentase kualitas SDM Aparatur responsif Gender	20%	20%	20%	20%	20%
			Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Disiplin Aparatur (orang)	35	36	38	39	41

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah.

Tabel 4.3.
Penentuan Strategi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)
1. 2. 3. 4.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan serta Pengelolaan Sumberdaya Laut, P3K ➢ Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur ➢ Pemberdayaan masy. Pesisir skala mikro khususnya Koperasi Perikanan dan Koperasi Usaha Mikro berorientasi pada usaha kelautan dan Perikanan ➢ Peningkatan sistem perinagatan dini dan penanganan tanggap darurat 	1. Volume produksi Perikanan <ul style="list-style-type: none"> a. Perikanan Budidaya b. Perikanan Tangkap 2. Nilai Produksi Perikanan <ul style="list-style-type: none"> a. Perikanan Budidaya b. Perikanan Tangkap 3. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Peningkatan Pengelolaan Kelautan Dan Perikanan Yang Efisien Dan Efektif ➢ Peningkatan Produksi Kelautan Dan Perikanan
5.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan 	1. Cakupan Luas Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan 2. Persentase cakupan wilayah pengelolaan perikanan yang terawasi dari kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan 3. Jumlah kasus penyelesaian dan penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu 4. Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penata kelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
6. 7. 8. 9.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan ➢ Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat ➢ Meningkatnya pemasaran hasil produksi perikanan yang mempunyai daya saing ➢ Meningkatnya pengelolaan pemasaran produksi perikanan 	✓ Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran ✓ Konsumsi Ikan Perkapita (kg/kap/thn)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Perbaikan Mutu Dan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Perluasan pasar ekspor ➢ Peningkatan Efisiensi Usaha Pemasaran Hasil-Hasil Perikanan ➢ Perluasan Pasar Produk Dan Hasil-Hasil Kelautan Dan Perikanan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	➢ Meningkatkan keterampilan dan inovasi pelaku usaha kelautan dan perikanan	Jumlah tenaga kerja dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dalam melakukan usaha :	➢ Peningkatan Keterampilan Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan Kemitraan pelaku dengan sumber inovasi
11.	➢ Meningkatkan kualitas sumberdaya aparart	1. Nelayan Laut	➢ Peningkatan Kompetensi Aparat Penyelenggara Pemerintahan
12.	➢ Meningkatkan kemudahan publik mengakses dan dan informasi pembangunan daerah	2. Pembudidaya	➢ Perbaikan Kualitas Pelayanan Perkantoran
13.	➢ Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	3. Pengolahan	
		4. Pemasar Ikan	
		5. Jumlah pelaku usaha mikro	

Tabel. 4.4.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Secara Berkelanjutan Menuju Sinjai Sejahtera			
MISI I : Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan Kemakmuran Ekonomi Dan Taraf Kehidupan Masyarakat ✓ Meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan ✓ Meningkatkan Sistem peringatan dini dan penanganan tanggap darurat 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan serta Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ➢ Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur ➢ Pemberdayaan masy. Pesisir skala mikro khususnya koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan dan Koperasi Usaha Mikro berorientasi pada usaha kelautan dan Perikanan ➢ Peningkatan sistem perinagatan dini dan penanganan tanggap darurat 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Peningkatan Pengelolaan Kelautan Dan Perikanan Yang Efisien Dan Efektif ➢ Peningkatan Produksi Kelautan Dan Perikanan ➢ Perluasan Pasar Produk Perikanan ➢ Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengendalian Mutu Lingkungan Kawasan Dan Potensi Bencana ➢ Peningkatan Sarana Dan Prasarana Produksi ➢ Peningkatan Investasi Usaha Kelautan Dan Perikanan ➢ Peningkatan Akses Masyarakat Ke Aset Produksi ➢ Perluasan Pasar Perikanan Lokal Dan Antar Daerah ➢ Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, air tawar dan pembudidayaan ikan ➢ Pengembangan pemanfaatan sumberdaya perairan umum
MISI II : Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan kelestarian lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatkan kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penatakelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penyusunan instrumen kebijakan pengelolaan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau kecil secara terpadu ➢ Pengendalian aktivitas pengelolaan dan pembangunan sesuai daya dukung lingkungan ➢ Pemberdayaan masyarakat pesisir ➢ Penyadaran masyarakat pengelolaan sumberdaya laut, P3K dengan memperhatikan Pengarustamaan Gender ➢ Pengawasan dan penegakan hukum pelanggaran pengelolaan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau kecil ➢ Mengelola SDK termasuk membangun sistem pengendalian dan pengawasan ➢ Mengendalikan Pencemaran ➢ Menjalin kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan Teluk Bone ➢ Percepatan pengembangan usaha perikanan yang maju dan kompeteitif serta berwawasan lingkungan melalui pembangunan dan pengembangan sarana yang memadai

MISI III : Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal kelautan dan perikanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
✓ Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan keunggulan lokal dan sinergitas regional, nasional dan global	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatkan produksi hasil kelautan dan perikanan ➢ Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat ➢ Meningkatnya pemasaran hasil produksi perikanan yang mempunyai daya saing ➢ Meningkatnya pengelolaan pemasaran produksi perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Peningkatan efisiensi usaha kelautan dan perikanan ➢ Perbaikan mutu dan daya saing produk lokal kelautan dan perikanan ➢ Peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pemanfaatan potensi lokal 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana produksi bermutu dan terjangkau ➢ Pengembangan usaha berskala ekonomis ➢ Pemanfaatan potensi unggulan lokal ➢ Penataan kelembagaan dan tata kelola usaha dan kelompok masyarakat ➢ Perluasan dan penguatan kemitraan dengan industri dan pihak terkait ➢ Diversifikasi produk kelautan dan perikanan ➢ Ketersediaan informasi pasar produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan ➢ Standarisasi mutu produk sesuai ketentuan pasar internasional ➢ Inovasi produksi produk kelautan dan perikanan potensi lokal
MISI IV : Mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan yang terampil, profesional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan lapangan pekerjaan dan usaha perikanan ✓ Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih dengan penataan sistem kelembagaan pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatkan keterampilan dan inovasi pelaku usaha kelautan dan perikanan ➢ Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur ➢ Meningkatnya kemudahan publik mengakses dan informasi pembangunan daerah ➢ Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pembinaan para pelaku usaha kelautan dan perikanan ➢ Peningkatan transparans, kepastian hukum serta efektifitas penggunaan anggaran ➢ Peningkatan kompetensi aparat ➢ Perbaikan kualitas pelayanan perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengembangan kualitas manajemen usaha ➢ Diseminasi IPTEK mutakhir usaha kelautan dan perikanan ➢ Pengembangan dan penguatan karakter kewirausahaan para pelaku usaha ➢ Kemitraan kelompok usaha dengan sumber inovasi ➢ Pelatihan dan kursus para aparat pengelola ➢ Peningkatan status pendidikan formal aparat ➢ Reformasi birokrasi ➢ Standarisasi sistem dan mekanisme layanan publik ➢ Koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan ➢ Memperkuat kapasitas kelembagaan dan peraturan perundang-undangan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritas kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional SKPD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan. Program/kegiatan diluar prioritas tetap dilaksanakan dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan Pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Arah kebijakan pembangunan

Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun Kabupaten Sinjai periode 2013-2018 adalah sebagai berikut.

a. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2013

Arah Kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Kebijakan pembangunan pada tahun 2013 diarahkan kepada:

- Pengembangan ekonomi kerakyatan:
 - (1) Peningkatan produksi perikanan;
 - (2) Peningkatan sarana penyuluhan perikanan;
 - (3) Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap usaha produktif;
 - (4) Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur

b. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari berlakunya RPJMN 2010-2014. Karena itu, prioritas RPJMN menjadi perhatian. Selain itu, tahun 2014 merupakan tahun demokrasi dan politik, sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden, sehingga perhatian juga perlu diberikan terkait hal tersebut. Kebijakan pembangunan tahun 2014 diarahkan kepada:

1. Pembinaan dan pengentasan masyarakat tidak mampu:
 - (1) Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap usaha produktif;
 - (2) Penguatan kelompok nelayan dan pembudidaya ikan.
2. Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah:
 - (1) Peningkatan kapasitas kawasan pesisir;
 - (2) Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat pesisir dan pulau;
3. Reformasi Birokrasi dan Penguatan Governance:
 - (1) Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan daerah;
 - (2) Peningkatan kompetensi aparatur ;
 - (3) Pengembangan transparansi birokrasi;
 - (4) Penertiban pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 - (5) Perbaikan administrasi pemerintahan umum;
 - (6) Pengarusutamaan Gender.

c. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015

Arah kebijakan Tahun 2015 lebih diarahkan pada peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berupa:

1. Peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan:
 - (1) Perlindungan kerusakan terumbu karang;
 - (2) Penanganan dampak lingkungan;
 - (3) Antisipasi perubahan iklim.

2. Peningkatan ekonomi kerakyatan:

- (1) Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur
- (2) Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap usaha produktif;
- (3) Pengembangan dukungan Koperasi usaha mikro dan koperasi perikanan.

d. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016

Pada tahun 2016 seluruh pembangunan diarahkan untuk mengkselerasi capaian kinerja seluruh kebijakan yang telah dijalankan pada tiga tahun sebelumnya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global.

e. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017

Pada tahun 2017 prioritas diberikan kepada kebijakan-kebijakan yang target kinerjanya masih jauh dari pencapaian. Sementara kebijakan yang target kinerjanya sudah mendekati pencapaian maka percepatan dilakukan untuk menuntaskan pencapaian tersebut.

f. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018

Tahun 2018 merupakan tahun akhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2013 – 2018 sekaligus merupakan tahun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai. Prioritas kebijakan diarahkan pada evaluasi pencapaian dari tahun-tahun sebelumnya, disamping itu dilakukan percepatan target pembangunan yang belum mencapai target

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Perumusan rencana program kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan Dinas Kelautan dan Perikanan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Sehingga dalam lima (5) tahun, arsitektur perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan. Adapun pelaksanaan Misi berdasarkan Tema tersebut adalah sebagai berikut :

a) Misi I :

Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- Tujuan :
- Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan taraf kehidupan masyarakat
 - Meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan
 - Meningkatkan sistem peringatan dini dan penanganan tanggap darurat

Sasaran :

- Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan serta pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil,
- Pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil,
- Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur
- Pemberdayaan masyarakat pesisir dan skala mikro khususnya koperasi perikanan dan koperasi usaha mikro berorientasi pada usaha kelautan dan perikanan,
- Peningkatan sistem peringatan dini dan penanganan tanggap darurat

Didukung oleh program :

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Indikator Program :

- a. Volume Produksi Perikanan Budidaya dari 61.654,3 ton tahun 2013 menjadi 94.142,84 ton tahun 2018
- b. Nilai produksi perikanan budidaya dari 44.595.010.000 tahun 2013 menjadi 178.162.382.229 pada tahun 2018
- c. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia

Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi dan mendukung program prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 yaitu Peningkatan sarana infrastruktur. Selain itu sesuai dengan target Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan yaitu **Penguatan Paket Bibit Perikanan** sebesar 100.000 paket sampai tahun 2018, maka dalam rangka mendukung program tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai siap menjadi salah satu kabupaten yang menjadi pelaksana. Adapun tujuan program adalah (1) Peningkatan Pendapatan, (2) Penyerapan Tenaga Kerja melalui usaha perikanan budidaya.

Sasaran produksi yang akan dicapai pada tahun awal kondisi yakni tahun 2013, sebesar 61.654,3 ton dan dengan kondisi akhir tahun 2018 sebesar 94.142,84 ton. Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang bertumpu pada potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal seperti Rumput Laut, Udang dan Bandeng. Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain perlu diperhatikan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan kelembagaan, akses permodalan dan perluasan jejaring dan kemitraan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan kegiatan :

- (1) Pengembangan teknologi dengan sistem perbenihan air tawar
- (2) Pengembangan kawasan budidaya air tawar
- (3) Pemantauan penggunaan Obat Ikan Kimia dan Biologi
- (4) Penerapan CBIB dan CPIB
- (5) Peningkatan SDM petugas Teknis BBI dan Budidaya
- (6) Pengembangan pelayanan usaha budidaya komoditas unggulan rumput laut,
- (7) Pengembangan sarana dan prasarana budidaya
- (8) Pengembangan kelompok pembudidaya ikan,
- (9) Pengembangan Sarana dan Prasarana BBI dan UPR
- (10) Penyusunan data statistik perikanan budidaya

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Indikator Kinerja :

- a. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 262.480,3 ton tahun 2013 menjadi 275.869,4 ton tahun 2018
- b. Nilai Produksi Perikanan Tangkap Rp.3.554.171.195 tahun 2013 menjadi Rp. 3.735.469.646 tahun 2018
- c. Jumlah sarana dan prasaran yang tersedia

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengembangan usaha perikanan tangkap berkelanjutan merupakan upaya revitalisasi dan perbaikan orientasi pembangunan perikanan berkelanjutan dengan menekankan pada tiga aspek kajian yang merupakan dasar pertimbangan arahan kebijakan dalam melahirkan program dan kegiatan, meliputi:

- 1) Inovasi dan pengembangan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan,

- 2) Pendalaman pengetahuan dan pemahaman terhadap target tangkapan, dan
- 3) Pengenalan dan penguasaan karaktersitik daerah penangkapan ikan

Ketiga aspek kajian ini merupakan ruang lingkup pengembangan dan pembangunan perikanan tangkap yang menentukan keberhasilan dan tingkat produktifitas unit usaha. Kajian teknologi penangkapan ikan (*fishing technology*) lebih diarahkan pada peningkatan produktifitas penangkapan sebagai target pencapaian dengan indikator kinerja diarahkan pada efektifitas dan efisiensi upaya penangkapan ikan yang dilakukan. Bagian dari ruang lingkup kajian ini meliputi:

- a) Penerapan teknologi penangkapan ikan berbasis potensi ruang dengan menetapkan komoditas unggulan sebagai target tangkapan,
- b) Pemanfaatan teknologi alat bantu penangkapan ikan seperti rumpun, cahaya, umpan, dan resonansi suara
- c) Penanganan dan pengendalian teknologi penangkapan ikan yang overfishing dan tidak ramah lingkungan (*destructive fishing*) melalui pengelolaan jumlah dan jenis alat tangkap, pengaturan ukuran mata jaring untuk selektifitas target tangkapan, dan pembatasan daerah operasi penangkapan ikan pada zona terlarang.

Adapun dukungan kegiatan adalah :

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan dan alat bantu penangkapan
- (2) Penyediaan Kapal, dan
- (3) Pengembangan dan Peningkatan PPI

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator Kinerja :

- a. Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan sampai tahun 2018.
- b. Jumlah kelompok usaha masyarakat pesisir yang memenuhi standar sampai tahun 2018.

Program ini diarahkan pada pengembangan pengembangan dan pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu program yang mendukung penanganan kemiskinan dan kesejahteraan nelayan. Perubahan sosial ekonomi di desa-desa pesisir atau desa nelayan telah memperjelas garis stratifikasi sosial masyarakatnya. Nelayan kecil merupakan lapisan yang paling

banyak jumlahnya dimana mereka hidup dalam taraf kemiskinan dan tekanan-tekanan social ekonomi yang berakar pada factor-faktor kompleks yang saling terkait. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

- (1) Pengembangan unit usaha dan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,
- (2) Pengembangan usaha makro mandiri kawasan pesisir dan pulau-pulau
- (3) Pengembangan kawasan konservasi laut dan P3K

b) Misi II :

Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Tujuan : - Meningkatkan Kelestarian lingkungan

Sasaran : - Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan

Didukung oleh program :

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja :

- a. Persentase cakupan wilayah pengelolaan perikanan yang terawasi dari illegal fishing sampai pada tahun 2018,
- b. Porsentase cakupan wilayah pengelolaan perikanan yang terawasi dari kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan,
- c. Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam kegiatan pengawasan,

Program ini diarahkan untuk memelihara dan melindungi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terutama Sumberdaya yang telah mengalami degradasi tingkat produktivitasnya. Upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung program yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dalam memelihara dan melindungi sumberdaya perikanan dan kelautan dengan membentuk sistem pengawasan berbasis masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan khususnya untuk pengawasan destructive fishing, illegal fishing, pengamanan sumberdaya ikan dan lingkungan, penataan dan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perikanan. Program ini juga diarahkan untuk penguatan kelembagaan organisasi masyarakat lokal sebagai upaya strategis dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan.

Adapun kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran meliputi :

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan,
- (2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Gelar Operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan,

5. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Pendayagunaan

Indikator Kinerja :

- a. Porsentase penyelesaian tindak pidana yang disidik secara akuntabel dan tepat waktu sampai pada tahun 2018
- b. Jumlah fasilitasi produk hukum (regulasi dan kebijakan)

Program ini diarahkan untuk memberikan kesadaran dan penegakan hukum pendayagunaan kepada masyarakat melalui pemberian regulasi dan kebijakan hukum. Upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung program yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dalam memelihara dan melindungi sumberdaya perikanan dan kelautan dengan melakukan pembinaan tentang sistem pengawasan berbasis masyarakat.

Adapun kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran meliputi :

- (1) Pelatihan dan Pendidikan PPNS
- (2) Penyuluhan Hukum,

6. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan

Indikator Kinerja :

- a. Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan

Adapun kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran meliputi :

- (1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan,
- (2) Penyediaan Kendaraan Roda Dua Operasional Penyuluhan,

c) Misi III :

Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Lokal Kelautan dan Perikanan

Tujuan : - Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan keunggulan lokal dan sinergitas regional, nasional dan global

Sasaran :

- Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan
- Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatnya pemasaran hasil produksi perikanan yang mempunyai daya saing
- Meningkatnya pengelolaan pemasaran produksi perikanan

Didukung oleh program :

7. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan

Indikator Kinerja :

- a. Konsumsi perkapita pertahun dari 75 kg pada tahun 2013 menjadi 77 kg perkapita pertahun pada tahun 2018,
- b. Jumlah sarana dan prasarana penolahan dan pemasaran yang tersedia

Program ini diarahkan untuk peningkatan nilai tambah melalui peningkatan mutu dan jenis olahan hasil perikanan, usaha ini akan menciptakan peningkatan dan pemerataan pendapatan khusus para pelaku usaha olahan hasil perikanan. Tujuan pemasaran akan tercapai melalui usaha (1) Peningkatan sumberdaya manusia dalam hal ini adalah pelaku usaha, (2) Peningkatan sarana olahan dan kelembagaan usaha, (3) Peningkatan informasi pasar.

Adapun kegiatan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran meliputi :

- (1) Pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan,
- (2) Pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan,
- (3) Pengembangan Laboratorium dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan,
- (4) Pembuatan Pasar Hasil Perikanan,
- (5) Pembuatan Pasar Higienis,
- (6) Pengembangan Sarana dan Prasarana pengolahan hasil perikanan dan kelautan
- (8) Penyediaan kendaraan roda dua pemasaran
- (9) Penyusunan Data statistik pengolahan hasil-hasil perikanan.

d) Misi IV :

Mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Terampil, Profesional, Kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan : - Meningkatkan lapangan pekerjaan dan usaha perikanan
- Meningkatkan pemerintahan yang baik dan bersih dengan penataan sistem kelembagaan pemerintahan.

Sasaran :

- Meningkatnya keterampilan dan inovasi pelaku usaha kelautan dan perikanan
- Meningkatnya kualitas aparatur

- Meningkatnya kemudahan publik mengakses data dan informasi
- Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Program teknis yang mendukung pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan didukung oleh program :

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

- Indikator Kinerja : a. Jumlah tenaga kerja pembudidaya dan pembenih ikan dengan memperhatikan jumlah keterwakilan perempuan dan laki-laki.
- b. Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan

Program ini diarahkan untuk peningkatan SDM pelaku usaha budidaya telah tertuang dalam kegiatan teknis melalui kegiatan :

- (1) Pengembangan kawasan budidaya
- (2) Pengembangan kawasan budidaya air payu, tawar dan laut
- (3) Pengembangan kelompok usaha budidaya

Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan

- Indikator Kinerja : a. Jumlah tenaga kerja pengolahan dan pemasar yang mengikuti kegiatan pengembangan kualitas SDM dengan memperhatikan jumlah keterwakilan perempuan dan laki-laki

Program ini diarahkan untuk peningkatan SDM pengolah dan pemasar telah tertuang dalam kegiatan teknis melalui kegiatan :

- (1) Bimbingan Teknis Pembuatan Jelly dan Stick Rumput Laut,
- (2) Bimbingan Teknis Kelompok Pengolahan hasil laut dan perikanan,

Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- Indikator Kinerja : a. Jumlah kelompok usaha masyarakat pesisir yang memenuhi standar kelembagaan

- b. Jumlah penguatan kelembagaan konservasi

Program ini diarahkan untuk peningkatan SDM pelaku usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil telah tertuang dalam kegiatan teknis melalui kegiatan :

- (1) Pengembangan unit usaha dan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
- (2) Pembinaan Kelompok kelembagaan konservasi

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja : a. Jumlah SDM Pengawasan, PPNS dan Masyarakat Pengawasan yang memiliki keahlian bidang pengawasan jumlah keterwakilan perempuan dan laki-laki.

Program ini diarahkan untuk peningkatan SDM pengawasan, PPNS dan masyarakat pengawasan yang didukung melalui kegiatan seperti :

- 1) Pengembangan dan peningkatan SDM Pengawasan, PPNS dan Masyarakat Pengawas
- 2) Jumlah PPNS perikanan yang dididik dan ditingkatkan kompetensinya

Sedangkan untuk pengembangan SDM Aparat dan Tata Pemerintahan yang baik didukung oleh program yang dilaksanakan oleh bidang sekretariat yaitu :

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja: a. Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor, pengelolaan keuangan dan administrasi kantor (1 tahun)

Program yang diarahkan untuk peningkatan kinerja, pelayanan administrasi perkantoran Dinas Kelautan dan Kabupaten Sinjai melalui usaha :

- Peningkatan sarana dan fasilitas kebutuhan kantor
- Penyediaan jasa pelayanan administrasi keuangan
- Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan asset daerah

Kegiatan :

- (1) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan,
- (2) Pelayanan administrasi perkantoran
- (3) Penyediaan jasa administrasi keuangan.

9. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

Indikator Kinerja :

Jumlah pembinaan dan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

Program yang diarahkan untuk peningkatan kinerja dan pelayanan sarana dan prasarana aparatur melalui usaha :

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Di dukung dengan kegiatan

- (1) Penyediaan perlengkapan dan peralatan perkantoran
- (2) Penyediaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran

10. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya dan Disiplin Aparatur

Indikator Kinerja :

- a. Persentase kualitas SDM Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan
- b. Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Disiplin Aparatur

Program ini diarahkan untuk peningkatan budaya kerja aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai dan pelayanan administrasi kepegawaian melalui kegiatan :

- (1) Peningkatan disiplin aparat dan pengembangan kapasitas sumberdaya aparat

11. Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Capaian Kinerja

Indikator Kinerja :

- a. Persentase dokumen perencanaan program kegiatan yang terintegrasi, tepat waktu dan akuntabilitas kinerja dinas serta laporan tahunan dan statistik 20% per tahun

Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi kegiatan serta pelayanan data dan informasi statistik capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan:

- (1) Penyusunan laporan perencanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan serta pelaporan capaian kinerja SKPD,
- (2) Penyusunan laporan tahunan dan data statistik perikanan dan kelautan.

5.2 Indikator kinerja

Indikator kinerja merupakan pendukung kinerja pelayanan yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai mendukung indikator RPJMD dan Indikator Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai seperti terlihat pada tabel 5.1 di bawah ini :

5.3 Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Berdasarkan penetapan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam bentuk rencana aksi untuk mendukung pencapaian visi dan misi maka indikator sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang hendak dicapai selama kurun waktu 5 tahun mendatang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.1. Rencana Program Dan Kegiatan Berdasarkan Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Satuan Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sinjai

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET KINERJA						KLP SASARAN
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MISI I : Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan											
	<div>✓ Meningkatkan Kemakmuran Ekonomi Dan Taraf Kehidupan Masyarakat</div> <div>✓ Meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan</div> <div>✓ Meningkatkan Sistem peringatan dini dan penanganan tanggap darurat</div>	<div>➢ Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan serta Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</div> <div>➢ Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur</div> <div>➢ Pemberdayaan masy. Pesisir skala mikro khususnya Koperasi Perikanan dan Koperasi Usaha Mikro berorientasi pada usaha kelautan dan Perikanan</div> <div>➢ Peningkatan sistem peringatan dini dan penanganan tanggap darurat</div>	Volume produksi Perikanan budidaya (ton)	Program Pengembangan Budidaya Perikanan							Masy. Pem budidaya
			Nilai Produksi Perikanan (Rp.1.000)								
			Volume produksi Perikanan Tangkap (ton)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap							Masy. Nelayan
			Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.1.000)								
			Jumlah Pulau- Pulau Kecil yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan (pulau)	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan							Masy. Pesisir & Pulau-pulau Kecil
MISI II : Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan											
	<div>✓ Meningkatkan kelestarian lingkungan</div>	<div>➢ Meningkatkan kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan</div>	<div>▪ Cakupan Luas Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan</div>	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan							Masy. Pesisir & Pulau-pulau Kecil

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET KINERJA						KLP SASARAN
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<ul style="list-style-type: none">Jumlah kasus penyelesaian dan penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan							Masy. Pesisir & Pulau-pulau Kecil
			<ul style="list-style-type: none">Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan (klp)								
MISI III : Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal kelautan dan perikanan											
	<ul style="list-style-type: none">✓ Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan an keunggulan lokal dan sinergitas regional, nasional dan global	<ul style="list-style-type: none">➢ Meningkatkan produksi hasil kelautan dan perikanan➢ Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat➢ Meningkatnya pemasaran hasil produksi perikanan yang mempunyai daya saing➢ Meningkatnya pengelolaan pemasaran produksi perikanan	<ul style="list-style-type: none">Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaranKonsumsi Ikan Perkapita (kg/kap/thn)	Program Optimalisasi Pengolahandan Pemasaran Produk Perikanan							Unit Pengolahan Ikan skala kecil dan menengah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET KINERJA						KLP SASARAN
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MISI IV : Mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan yang terampil, profesional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas											
	✓ Meningkatkan lapangan pekerjaan dan usaha perikanan	➢ Meningkatnya keterampilan dan inovasi pelaku usaha kelautan dan perikanan	Jumlah tenaga kerja dari usaha pembudidaya (Org)	Program Pengembangan Budidaya Perikanan							Masy. Pem budidaya
			Jumlah tenaga kerja Nelayan (org)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap							Masy. Nelayan
			Jumlah tenaga kerja Pengolahan (org)	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan							Unit Pengolahan Ikan, dan pemasar ikan
			Jumlah tenaga kerja Pemasaran (org)								
	✓ Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih dengan penataan sistem kelembagaan pemerintahan	➢ Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur ➢ Meningkatnya kemudahan publik mengakses dan informasi pembangunan daerah ➢ Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor, pengelola keuangan dan administrasi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	1	1	1	1	Dinas KP
			Persentase kualitas SDM Aparatur pengelola sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperhatikan keterwakilan jumlah laki-laki dan perempuan	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya dan Disiplin Aparatur	10	20	40	60	80	100	Aparatur Dinas KP
			Jumlah disiplin aparatur dan pelayanan administrasi kepegawaian (orang)	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya dan Disiplin Aparatur	38	35	35	37	37	39	Aparatur Dinas KP
			Persentase dokumen perencanaan program kegiatan yang terintegrasi, tepat waktu, dan akuntabilitas kinerja dinas serta laporan tahunan dan statistik	Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Capaian Kinerja	10	25	40	55	65	100	Dinas KP

Tabel 5.2. Rencana Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif berdasarkan RPJMD Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Sinjai

Kode	Usunan Pemerintah Daerah	Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD 2013	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2018)	
					2014		2015		2016		2017		2018			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		URUSAN PILIHAN														
		BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Volume Produksi Perikanan		28.498,95 Ton	1.700.000.000	28.926,43 Ton	1.700.000.000	29.504,95 Ton	1.700.000.000	30.095,04 Ton	1.700.000.000	30.546,46 Ton	1.700.000.000	147.571,83 Ton
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Penangkapan dan Alat Bantu Penangkapan	Jumlah Alat Penangkapan Ikan dan Alat bantu Penangkapan Ikan Yang Memenuhi Standar Unit		50 Paket	1.200.000.000	50 Paket	1.500.000.000	50 Paket	1.500.000.000	100 Paket	2.000.000.000	50 Paket	1.500.000.000	300 Paket
			Pengadaan Kapal	Jumlah Kapal Penangkap Ikan Yang Memenuhi Standar Laik Laut, Laik Tangkap		10 Un it	660.000.000	15 Unit	880.000.000	15 Unit	880.000.000	15 Unit	1.000.000.000	10 Unit	1.000.000.000	65 Unit
			Pengembangan dan Peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Jumlah Sarana dan Prasarana PPI Yang Tersedia		10 Paket	5.000.000.000	10 Paket	5.000.000.000	10 Paket	5.000.000.000	10 Paket	5.000.000.000	10 Paket	5.000.000.000	50 Paket
			Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Luas Kawasan Konservasi Yang Dikelola Secara Berkelanjutan		100 Ha	5.000.000.000	100 Ha	5.000.000.000	100 Ha	5.000.000.000	100 Ha	5.000.000.000	100 Ha	5.000.000.000	100 Ha
			Pengembangan Unit Usaha dan Ekonomi Masyarakat Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat Pesisir Yang Memenuhi Standar Kelembagaan		10 Klp	50.000.000	15 Klp	80.000.000	15 Klp	80.000.000	20 Klp	100.000.000	20 Klp	100.000.000	20 Klp
			Pengembangan Usaha Makro Mandiri Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau	Jumlah Pelaku Usaha Makro Yang Mandiri Di Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau		60 Org/Klp	2.000.000.000	60 Org/Klp	2.000.000.000	80 Org/Klp	2.500.000.000	90 Org/Klp	3.000.000.000	100 Org/Klp	3.500.000.000	250 Org/Klp
			Pengembangan Kawasan Konservasi Laut dan P3K	Luas Kawasan Konservasi Yang Dikelola Secara Berkelanjutan		50 Ha	2.000.000.000	50 Ha	2.000.000.000	50 Ha	2.000.000.000	50 Ha	2.000.000.000	50 Ha	2.000.000.000	50 Ha
			Pembangunan Jalan Kampung/Desa Pesisir	Jumlah Sarana dan Prasarana Masyarakat Pesisir Yang Tersedia		5 Paket	2.500.000.000	5 Paket	3.000.000.000	5 Paket	3.000.000.000	6 Paket	3.500.000.000	6 Paket	3.500.000.000	25 Paket
			Pembuatan Tambatan Perahu	Jumlah Sarana dan Prasarana Masyarakat Pesisir Yang Tersedia		3 Paket	500.000.000	4 Paket	660.000.000	5 Paket	880.000.000	5 Paket	1.000.000.000	5 Paket	1.000.000.000	15 Paket
			Pembuatan Sarana Air Bersih	Jumlah Sarana dan Prasarana Masyarakat Pesisir Yang Tersedia		3 paket	650.000.000	5 paket	850.000.000	5 paket	850.000.000	5 paket	850.000.000	7 paket	1.200.000.000	5 paket
			Pembinaan Kelompok Kelembagaan Konservasi	Jumlah Penguatan Kelembagaan Konservasi (Pengarus Utama Gender)		5 Klp	75.000.000	5 Klp	75.000.000	5 Klp	75.000.000	5 Klp	75.000.000	5 Klp	75.000.000	20 Klp
			Penyediaan Kendaraan Roda Empat Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi		-	-	1 Unit	440.000.000	1 Unit	440.000.000	1 Unit	440.000.000	1 Unit	440.000.000	1 Unit
			Pembuatan Penahan Ombak	Bertambahnya Luas Kawasan Konservasi Peraliran		10 Km	4.000.000.000	10 Km	4.000.000.000	10 Km	4.000.000.000	10 Km	4.000.000.000	10 Km	4.000.000.000	10 Km

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2013	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2018)	
					2014		2015		2016		2017		2018			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		URUSAN PILIHAN														
		BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
		Program Pengelolaan Pengembangan Budidaya Perikanan	Volume Produksi Perikanan Budidaya			14.933 Ton	2.000.000.000	16.880,78 Ton	2.000.000.000	18.828,57 Ton	2.000.000.000	20.776,35 Ton	2.000.000.000	22.724,14 Ton	2.000.000.000	94.142,84 Ton
		Keramba Jaring Apung (KJA)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembenihan Yang Dikembangkan			5 Unit	440.000.000	5 Unit	440.000.000	7 Unit	660.000.000	7 Unit	660.000.000	10 Unit	1.200.000.000	34 Unit
		Pengembangan Teknologi dan Sistem Pembenihan	Jumlah Bibit Rumput Laut			2.955 Ton	150.000.000	3.084 Ton	200.000.000	4.112 Ton	250.000.000	4.626 Ton	350.000.000	5.140 Ton	500.000.000	19.917 Ton
		Pengembangan Kawasan Budidaya	Jumlah Tenaga Kerja Pembudidaya dan Pembenih Ikan (Pengarus Utamaan Gender)			214 Ton	100.000.000	214 Org	100.000.000	214 Org	100.000.000	214 Org	100.000.000	214 Org	100.000.000	214 Org
		Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau, Tawar, Laut	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)			10 Klp	1.000.000.000	10 Klp	1.000.000.000	10 Klp	1.000.000.000	10 Klp	1.000.000.000	10 Klp	1.000.000.000	10 Klp
		Penyediaan Bibit Rumput Laut	Jumlah Paket Bibit Perikanan Yang Diserahkan Ke Masyarakat Prioritas			200 Ton	250.000.000	200 Ton	250.000.000	200 Ton	300.000.000	200 Ton	300.000.000	200 Ton	350.000.000	1.000 Ton
		Road Map Kawasan Minapolitan	Jumlah Kawasan Potensial Perikanan Budidaya (Minapolitan)			10 Ha	2.000.000.000	10 Ha	2.000.000.000	10 Ha	2.000.000.000	10 Ha	2.000.000.000	10 Ha	2.000.000.000	10 Ha
		Penyediaan Bibit Udang dan Bandeng	Jumlah Paket Sarana Produksi Udang			2.000 Ekor	350.000.000	2.000 Ekor	350.000.000	2.000 Ekor	350.000.000	2.000 Ekor	350.000.000	2.000 Ekor	350.000.000	10.000 Ekor
		Pengukuran dan Pemetaan Luasan Lahan Budidaya	Luas Lahan Yang Difasilitasi Sesuai Target Produksi			715 Ha	60.000.000	-	-	-	-	715 Ha	100.000.000	715 Ha	100.000.000	715 Ha
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut	Jumlah paket Sarana Produksi Rumput laut			100 Paket	100.000.000	100 paket	100.000.000	100 Paket	100.000.000	100 Paket	150.000.000	100 Paket	180.000.000	300 Paket
		Pengembangan Areal Lahan Budidaya Tambak	Luas Lahan Yang Difasilitasi Sesuai Target Produksi			250 Ha	2.200.000.000	250 Ha	2.200.000.000	250 Ha	2.500.000.000	250 Ha	2.500.000.000	250 Ha	2.500.000.000	250 Ha
		Penyediaan Bibit Ikan Laut	Jumlah Bibit Ikan Laut			5.000 Ekor	250.000.000	5.000 Ekor	250.000.000	5.000 Ekor	250.000.000	5.000 Ekor	250.000.000	5.000 Ekor	250.000.000	10.000 Ekor
		Penyediaan Unit Pembenihan Yang Bersertifikat	Jumlah Unit Pembenihan Yang Bersertifikat (CPIB)			2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	250.000.000	2 Unit	350.000.000	2 Unit
		Penyediaan Unit Tambak Yang Bersertifikat	Jumlah Unit Tambak Yang Bersertifikat			10 Unit	500.000.000	10 Unit	500.000.000	10 Unit	500.000.000	10 Unit	500.000.000	10 Unit	500.000.000	5 Unit
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembenihan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembenihan Yang Tersedia			2 Unit	100.000.000	3 Unit	300.000.000	3 Unit	300.000.000	5 Unit	500.000.000	5 Unit	500.000.000	5 Unit
		Pengembangan Kelompok Pembudidaya Ikan	Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya Yang Memenuhi Standar Kelengkapan (Pengurus Utamaan Gender)			70 Klp	30.000.000	73 klp	35.000.000	75 Klp	40.000.000	77 Klp	45.000.000	80 Klp	50.000.000	100 Klp
		Pengembangan Kelompok Usaha	Unit Usaha Yang Memperoleh Layanan Dan Yang Beraktifitas Sesuai Dengan Ketentuan (Unit)			5 Klp	50.000.000	7 Klp	75.000.000	10 Klp	100.000.000	13 Klp	150.000.000	15 Klp	180.000.000	10 Klp
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Statistik	Jumlah Sarana dan Prasarana Statistik			5 Paket	80.000.000	5 Paket	80.000.000	5 Paket	80.000.000	5 Paket	80.000.000	5 Paket	80.000.000	10 Paket
		Penyediaan Kendaraan Roda Dua Petugas Statistik	Jumlah Sarana dan Prasarana Statistik			5 Unit	95.000.000	5 Unit	95.000.000	5 Unit	95.000.000	5 Unit	95.000.000	5 Unit	95.000.000	10 Unit
		Penyusunan Data Statistik Perikanan Budidaya	Informasi dan Data Statistik Perikanan Budidaya			1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen

Kode		Urusan Pemerintah Daerah	Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Periode RPJMD 2013	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2018)
						2014		2015		2016		2017		2018		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		URUSAN PILIHAN														
		BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
			Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Prosentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Yang Terawasi Dari Illegal Fishing		10%	80.000.000	10%	80.000.000	10%	80.000.000	10%	80.000.000	10%	80.000.000	45%
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Yang Terawasi Dari Kegiatan Yang Merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		10%	30.000.000	10%	30.000.000	15%	50.000.000	15%	50.000.000	50%	100.000.000	45%
			Pengembangan dan Peningkatan SDM Pengawasan, PPNS dan Masyarakat Pengawas	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Yang Berperan Aktif Dalam Kegiatan Pengawasan		9%	50.000.000	10%	50.000.000	11%	80.000.000	12%	80.000.000	12%	100.000.000	45%
			Gelar Operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan	Prosentase Cakupan Wilayah Pesisir dan Lautan Yang Terawasi Dari Kegiatan dan Pemanfaatan Ekosistem		68%	80.000.000	76%	80.000.000	84%	80.000.000	92%	80.000.000	100%	80.000.000	65%
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan	Prosentase Kapal Perikanan Yang Laik Operasi Penangkapan Ikan		84%	10.000.000	88%	10.000.000	92%	10.000.000	92%	10.000.000	92%	10.000.000	65%
			Penyediaan Kapal Pengawas	Kapal Pengawas (Unit)		-	-	5 Unit	500.000.000	5 Unit	500.000.000	5 Unit	500.000.000	5 Unit	500.000.000	20 Unit
			Penyediaan Speed Boat Pengawas	Speed Boat Pengawas		-	-	2 Unit	1.500.000.000	2 Unit	1.500.000.000	2 Unit	1.500.000.000	2 Unit	1.700.000.000	2 Unit
			Penyediaan Pos Pengawas	Pos Pengawas		1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000	-	-	2 Unit
			Penyediaan Gudang Pengawas	Gudang Pengawas		-	-	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	-	-	-	-	1 Unit
			Penyusunan Data Statistik Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Informasi dan Data Statistik Pengawasan		84%	10.000.000	88%	10.000.000	92%	10.000.000	96%	10.000.000	100%	10.000.000	90%
			Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Pendayagunaan	Prosentase Penyelesaian Tindak Pidana Yang Disidik Secara Akuntabel dan Tepat Waktu		84%	25.000.000	88%	25.000.000	92%	25.000.000	96%	25.000.000	100%	25.000.000	90%
			Pelatihan dan Pendidikan PPNS	Jumlah PPNS Perikanan Yang Dididik dan Ditingkatkan Kompetensinya		-	-	3 Org	200.000.000	3 Org	200.000.000	-	-	2 Org	150.000.000	3 Org
			Penyuluhan Hukum	Jumlah Fasilitas Produk Hukum (Regulasi dan Kebijakan)		-	-	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	-	-	3 Kali

Kode		Urusan Pemerintah Daerah	Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2013	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2018)
						2014		2015		2016		2017		2018		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		URUSAN PILIHAN														
		BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan	Jumlah Unit Pengelolaan Ikan Yang Bersertifikat		1 Unit	150.000.000	2 Unit	300.000.000	1 Unit	150.000.000	2 Unit	300.000.000	1 Unit	150.000.000	2 Unit
			Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan	Jumlah Usaha Skala Mikro Menengah dan Besar Yang Melakukan Kemitraan Usaha		30 Klp	1.500.000.000	30 Klp	1.500.000.000	30 Klp	1.500.000.000	30 Klp	1.500.000.000	30 Klp	1.500.000.000	50 Klp
			Bimbingan Teknis Pembuatan Jelly dan Stick Rumpit laut	Jumlah Tenaga Kerja Pada Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) Yang Dibina dan Dikembangkan Sehingga Memenuhi Standar Wirausaha		10 Klp	50.000.000	10 Klp	65.000.000	20 Klp	100.000.000	20 Klp	150.000.000	20 Klp	150.000.000	20 Klp
			Pembuatan Pasar Hasil Perikanan	Lokasi Pembinaan Pasar Hasil Perikanan		2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	-	-	-	-	2 Unit
			Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	Lokasi Pengembangan Pusat Produksi dan Industri Pengolahan Rumpit laut Dikondisi Ekonomi (Lokasi)		-	-	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	-	-	2 Unit
			Pembuatan Pasar Higienis	Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Besar Yang Dikembangkan dan Dibina Dalam Rangka Memenuhi Standar Mutu		-	-	2 unit	2.000.000.000	2 unit	2.000.000.000	2 unit	2.000.000.000	2 unit	2.000.000.000	2 unit
			Pengembangan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil perikanan	Jumlah Sertifikat Penerapan Sistem Jaminan Mutu (Sertifikat HHCCP) Di Unit Pengolahan Ikan Sebagai Persyaratan Ekspor		1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	2 Unit	300.000.000	2 Unit	300.000.000	7 Unit
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan	Lokasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan Yang Dikembangkan dan Dibina (Lokasi)		2 Paket	500.000.000	2 Paket	500.000.000	5 Paket	1.500.000.000	5 Paket	1.500.000.000	5 Paket	2.000.000.000	19 Paket
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan		10 Paket	500.000.000	200 Paket	1.000.000.000	200 Paket	1.000.000.000	200 Paket	1.000.000.000	300 Paket	1.500.000.000	910 Paket
			Penyediaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Pemasaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan		10 Paket	250.000.000	10 Paket	250.000.000	10 Paket	270.000.000	10 Paket	270.000.000	10 Paket	300.000.000	50 Paket
			Bimbingan Teknis Kelompok Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan	Jumlah Tenaga Kerja Pada Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) Yang Dibina dan Dikembangkan Sehingga Memenuhi Standar Wirausaha		10 Klp	80.000.000	10 Klp	80.000.000	10 Klp	80.000.000	10 Klp	80.000.000	10 Klp	80.000.000	50 Klp
			Penyusunan Data Statistik Pengolahan Hasil Perikanan	Informasi dan Data Statistik Pengolahan dan Pemasar		1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen
			Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan	Tersedianya Sarana Penyuluhan Perikanan		30 Unit	800.000.000	35 Unit	750.000.000	30 Unit	800.000.000	30 Unit	800.000.000	30 Unit	800.000.000	155 Unit
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional Penyuluhan	Tersedianya Prasarana Penyuluhan Perikanan		20 paket	500.000.000	20 paket	750.000.000	20 paket	750.000.000	20 paket	880.000.000	20 paket	880.000.000	1000 paket
			Penyediaan Kendaraan Roda Dua Operasional Penyuluhan	Tersedianya Prasarana Penyuluhan Perikanan		15 U nit	250.000.000	15 U nit	250.000.000	10 U nit	200.000.000	10 U nit	200.000.000	10 U nit	200.000.000	60 U nit

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2013	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2018)	
					2014		2015		2016		2017		2018			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		URUSAN PILIHAN														
		BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor, pengelolaan keuangan dan administrasi kantor (tahun)	1	1	415.000.000	1	500.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	750.000.000	1
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan	Peningkatan sarana dan fasilitas kebutuhan kantor (%)	100	100	250.000.000	100	350.000.000	100	375.000.000	100	550.000.000	100	750.000.000	100
				Persentase pengelolaan tata usaha, rumah tangga, administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan perlengkapan	5%	5%	250.000.000	10%	350.000.000	20%	350.000.000	40%	550.000.000	50%	760.000.000	50%
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas	Peningkatan pelayanan jasa administrasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan (%)	75%	75%	250.000.000	75%	350.000.000	80%	450.000.000	90%	550.000.000	100%	650.000.000	100%
			Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	Persentase kualitas SDM Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan	5%	10%	110.000.000	20%	235.000.000	40%	250.000.000	50%	300.000.000	65%	350.000.000	65%
				Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan disiplin aparatur	38	35	100.000.000	35	150.000.000	37	175.000.000	37	235.000.000	39	300.000.000	39
			Peningkatan Kapasitas SDM dan Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yang terlayani pada administrasi kepegawaian (orang)	38	35	100.000.000	35	150.000.000	37	175.000.000	37	200.000.000	39	250.000.000	39
			Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Capaian Kinerja	Persentase dokumen perencanaan program kegiatan yang terintegrasi, tepat waktu dan akuntabilitas kinerja dinas serta laporan tahunan dan statistik (%)	10%	25%	150.000.000	40%	175.000.000	55%	200.000.000	65%	250.000.000	100%	275.000.000	100%
			Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan capaian kinerja SKPD	Persentase layanan perencanaan dan capaian kinerja dinas (%)	50%	50%	150.000.000	65%	175.000.000	75%	200.000.000	85%	250.000.000	100%	275.000.000	100%
			Penyusunan Laporan Tahunan dan Data Statistik	Jumlah dokumen data statistik kelautan dan perikanan terkini dan tepat waktu (buah)	15	15	100.000.000	25	125.000.000	25	150.000.000	30	175.000.000	50	200.000.000	145
				Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tepat waktu (buah)	10	10	100.000.000	15	125.000.000	20	150.000.000	20	175.000.000	25	200.000.000	90

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SINJAI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja yang mengacu pada RPJMD

Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dituangkan pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2013 - 2018

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
B	Layanan Urusan Pilihan							
V	Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi Perikanan							
	a. Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	26.800	28.498,95	28.926,43	29.504,95	30.095,04	30.546,46	
	b. Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	14.166.39	14.933	20.112,39	21.434,78	23.565,2	25.923,78	
	c. Jumlah sarana dan prasarana tersedia							
2	Konsumsi Ikan							
	a. Jumlah konsumsi ikan (kg/kap/th)	76	76	76	76	77	77	
	b. Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran yang tersedia	10	200	200	200	200	300	
3	Tenaga Kerja (Orang)							
	a. Pembudidaya	3.841	3.879	3.917	3.956	3.994	4.010	
	b. Nelayan	8.481	8.566	8.651	8.653	8.735	8.820	
	c. Pengolahan	625	631	649	669	711	723	
	d. Pemasar	725	725	749	768	801	821	
	e. Pelaku usaha mikro	0	60	60	80	90	100	

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan pada tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 2013 – 2018.

Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2008 – 2013 disusun atas dasar Analisis lingkungan dan faktor penentu keberhasilan yang dimiliki, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, kecenderungan masa depan dan harapan yang ingin dicapai seperti tercermin dalam visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai.

Rencana Strategis (RENSTRA) melalui program dan kegiatan akan berubah dan berkembang mengikuti situasi dan kondisi dalam negeri, lingkungan dan era globalisasi dan perdagangan bebas yang berubah dengan cepat. Namun perubahan yang dilakukan akan tetap mengacu pada program-program pemerintah kabupaten Sinjai.

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) ini didukung berbagai pihak yang terkait dalam meningkatkan pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan - tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.